



Multikulturalisme
Yogyakarta
dan
Identitas Keindonesiaan

Rektorat
Penerbitan



Editor:
Sri Rahayu Budiarti
Muslimin A.R. Effendy

306.59827
MUL

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR
JALAN SATELIT KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
KAWASAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
KAWASAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

~~392~~
~~EJ~~
M

Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR
Nomor Induk : 13749
Tanggal : 19 JUL 2013

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan

Editor:

Sri Rahayu Budiarti

Muslimin A.R. Effendy

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Republik Indonesia
2009

MULTIKULTURALISME YOGYAKARTA DAN IDENTITAS KEINDONESIAAN

COPYRIGHT © DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2009

EDITOR: Sri Rahayu Budiarti & Muslimin A.R. Effendy

Ilustrasi sampul & isi: Penerbit Ombak

PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

MULTIKULTURALISME YOGYAKARTA DAN IDENTITAS KEINDONESIAAN

XIV + 110 HLM.: 14 x 21 CM

ISBN: 978-602-95784-1-6

FOTO SAMPUL: TUGU, YOGYAKARTA (JOGJAKINI.WORDPRESS.COM)



SEKAPUR SIRIH MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Assalamu' alaikum, Wr.Wb



Identitas keindonesiaan dalam perspektif Negara Kepulauan adalah adanya fakta bahwa meskipun kita berbeda secara budaya, etnik, sosial, budaya dan afiliasi politik namun tetap bersatu dalam mencapai cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia. Dalam konteks inilah pembangunan kebudayaan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, yang memiliki kompetensi untuk berkompetisi dalam era pergaulan global, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pembangunan kebudayaan tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa

adanya keterpaduan dengan pembangunan sektor lain.

Dalam perspektif multikulturalisme persoalan yang sering kali dihadapi adalah tuntutan ke arah demokratisasi dan kecenderungan kebangkitan budaya daerah serta tuntutan hak untuk hidup dan berkembang sebagai komunitas budaya agar mereka diberlakukan sama sebagai warga negara dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelompok masyarakat yang memiliki keragaman budaya yang sering diposisikan sebagai kelompok marginal menuntut pula agar diakui tidak hanya hidupnya tetapi juga keunikannya. Permasalahan baru muncul ketika tuntutan akan pengakuan itu dilancarkan tanpa kepedulian akan hak hidup kelompok lainnya. Karena itu multikulturalisme mencoba untuk mengembangkan toleransi, menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, menghormati perbedaan, mengakui hak dan keberadaan yang lain dengan melihat persamaan.

Dalam konteks inilah kita bisa menempatkan bahwa kota seperti Yogyakarta menjadi model bagaimana perbedaan itu dihargai bahkan “dipelihara” sebagai sebuah kekayaan dalam membangun “kota pelajar” dan „city of tolerance“ ini. Buku yang berjudul *Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan* ini adalah sebuah contoh lain bagaimana persatuan dalam keberagaman senantiasa dijaga dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat Membaca!

Jakarta, 8 September 2009



IR. JERO WACIK, S.E.

PENGANTAR EDITOR

Sebuah masyarakat multikultur akan menghadapi dua tuntutan yang saling bertentangan dan perlu menemukan sebuah struktur politik yang memungkinkan masyarakat untuk mendamaikan diri dengan cara yang adil dan dapat diterima bersama. Struktur politik tersebut harus bisa memupuk rasa persatuan yang kuat dan kebersamaan di antara warganya, juga sebaliknya, struktur politik tidak boleh berlaku seperti sebuah persatuan komunitas yang dapat mengambalalih dan menjalankan keputusan yang secara kolektif mengikat, mengatur serta melakukan resolusi konflik. Paradoks yang tampak, semakin besar dan semakin dalam keragaman dalam sebuah masyarakat, maka semakin besar pula kesatuan dan kohesi yang dibutuhkan untuk menyatukan mereka dan mempertahankan keragaman tersebut.¹

Demikian Parekh, pendukung utama multikulturalisme dalam bukunya yang baru saja diterbitkan setahun silam di Indonesia dengan judul *Rethinking Multiculturalism*. Ia memberi pemahaman kepada kita bahwa perbincangan mengenai multikulturalisme tidak hanya sekadar membuat kategorisasi "perbedaan" dan "identitas diri" untuk memahami diri mereka

¹ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. (Jogjakarta: Kanisius, 2008: 263). Diterjemahkan dari buku *Rethinking Multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory*, 2nd edition, PALGRAVE MACMILLAN, Hounmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010, oleh C.B. Bambang Kukuh Adi

dan dunianya. Melainkan lebih sebagai sebuah cara pandang tentang esensi kehidupan manusia yang menghargai keragaman kebudayaan dan merespons perbedaan atau keragaman itu sebagai sebuah rahmat.²

Bagi Indonesia, bangsa yang tergolong masih relatif muda, harus berjuang terlebih dahulu dengan gagasan nasionalisme. Budi Utomo misalnya, tampil sebagai organisasi "pemula" dalam kesadaran kolektif bangsa, terutama bagi "kemajuan bangsa Jawa". Bukankah kelahiran Budi Utomo adalah sebuah *event*, peristiwa yang disengaja terjadinya di tengah-tengah masyarakat yang "belum maju?" Budi Utomo bukan sekadar lontaran pemikiran tetapi sebuah peristiwa yang diwujudkan dalam suatu konteks struktural tertentu. Maka ketika hari kelahirannya tanggal 20 Mei 1908 ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai "Hari Kebangkitan Nasional", secara eksplisit negara yang sedang memperjuangkan eksistensinya itu ingin mengatakan bahwa perjuangan mendapatkan kemerdekaan bangsa sesungguhnya telah bermula sejak tahun 1908.³

Peristiwa kedua yang sejalan dengan itu juga dapat dilihat dengan pilihan "Sumpah Pemuda" (1928) sebagai perwujudan dari sebuah peristiwa yang besar, yaitu organisasi-organisasi pemuda terpelajar mengadakan "kongres pemuda" sebagai sebuah pengakuan fundamental akan kebersatuan dalam berbangsa, bertanah air dan berbahasa Indonesia. Penafsiran atas nasionalisme Indonesia ini selayaknya juga memberi dasar bagi sebuah kesadaran kolektif untuk mengembangkan

² Lihat Bhikhu Parekh, bab 5 "Memahami Kebudayaan" ... (2008: 223-233).

³ Taufik Abdullah, "Kata Pengantar", Sartono Kartodirdjo, *Sejak Indische Sampai Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005: xvii).

dan membangun sebuah pendekatan yang memungkinkan keragaman etnik dan kultural itu justru menjadi kekuatan bangsa untuk melanjutkan pencapaian cita-citanya. Bukankah para pendiri bangsa percaya bahwa sebuah negeri yang amat majemuk ini hanya mungkin dipersatukan dengan ikrar yang meneguhkan persatuan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik?.

Kini, ekspektasi yang dibayangkan warga adalah bagaimana kelompok etnik dan budaya yang berbeda itu memperoleh hak-hak politik, budaya, ekonomi, sosial, agama yang lebih luas. Dibeaskan dari prasangka dan bias etnosentris maupun kebebasan untuk mengeksplorasi dan belajar kebudayaan dari perspektif lain. Serta mampu memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal seperti demokrasi, keadilan, HAM, penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, kemerdekaan, hak budaya komuniti dan golongan minoritas.⁴

Dalam konstruksi seperti itu, multikulturalisme memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan mengeliminasi ketegangan dikotomis tentang realitas ganda atau ragam di sekitar etnisitas dan budaya. Dengan maksud seperti ini, multikulturalisme adalah sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi.⁵ Di sinilah titik perhatian multikulturalisme, yaitu menekankan pada kesetaraan dalam perbedaan.

⁴ Lihat Hikmat Budiman (ed), *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. (Jakarta: The Interseksi Foundation-Yayasan TIFA, 2007).

⁵ Daniel Sparringa, "Multikulturalisme Indonesia: Jawaban terhadap Kemajemukan", <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=P18-0-3-0-C>, diunduh 27 Pebruari 2009.

Kesetaraan dalam perbedaan hanya bisa dicapai apabila ada pengakuan hak dari berbagai pihak pada semua level untuk menjalin relasi antarkelompok masyarakat. Karena itu, untuk mengkampanyekan kesetaraan dalam perbedaan perlu dilakukan dialog yang berkelanjutan -- dengan beragam cara dan sarana -- untuk membenamkan *stereotypes* yang menghujam. Dialog tersebut berujung pada sebuah praktek agar kelompok etnik dan budaya yang berbeda itu memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya dan mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima pluralisme dan toleransi, mengakui dan menghormati perbedaan. Jika hal ini sudah terjadi maka bisa terciptalah sebuah masyarakat yang multikultural.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultural diperlukan beberapa strategi dasar dengan melihat situasi bangsa dewasa ini. *Pertama*, pendidikan. Sosialisasi dan diseminasi multikulturalisme melalui lembaga pendidikan dan jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan multikulturalisme hendaknya mengarahkan peserta didik terhadap konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak siswa masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan dan keterbatasannya. *Kedua*, kebijakan pemerintah yang memberi jaminan akan adanya kebersamaan dalam negara berdasarkan prinsip multikulturalisme. *Ketiga*, mendorong media agar berani mengambil jalan untuk melawan *stereotype* suku atau etnis tertentu dengan memperkenalkan bahwa kita, meskipun

berbeda tetapi bersatu dalam menatap Indonesia ke depan. Mengacu kepada gagasan Agus Maladi Irianto dalam artikelnya tentang *Media dan Isu Multikulturalisme*, “maka media menjadi model dari sebuah habitus yang berperan aktif dalam ranah sosial”.

Bahkan, tanpa sadar media telah membangun relasi sosial melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi, dan kultural dalam lorong waktu dan peristiwa yang nyaris tak terbatas. Di sini, media didorong untuk bisa menunjukkan sikap simpati, apresiasi, dan empati terhadap keragaman kebudayaan serta menolak pertikaian antar pemeluk agama, diskriminasi, dan hegemoni terhadap budaya lain. Gambaran keragaman itu jelas dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia, yang menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam artikelnya yang berjudul *Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi Atas Budaya Masyarakat Indonesia*, merupakan sebuah mosaik yang terdiri dari pecahan-pecahan dengan warna yang sebagian berbeda, sebagian mirip dengan yang lain. Kini, mosaik itu berubah menjadi permadani, penuh warna, corak dan motif. Menyilang dan menjalin satu sama lain, membentuk sebuah permadani budaya dengan gambar dan warna yang beragam”.

Lukisan permadani itu makin indah ketika semangat toleransi antarwarga diperkuat dengan regulasi dan dialog, yang memberi ruang bagi mereka untuk menyuarakan; “kita adalah anak ibu pertiwi”. Maka menarik kiranya, bahwa Jogjakarta sebagai “kota pendidikan” dan “kota toleransi” seperti catatan pengalaman M. Nursam (*Dialog dan Toleransi: Multikulturalisme di Kota Yogyakarta*), menjadikan dialog sebagai media yang efektif untuk menciptakan kebersamaan dan harmoni yang *teposeliro*. *Teposeliro* mengandung makna bahwa di atas semua kepentingan

individu masih ada kepentingan orang lain dan di atas itu lagi masih ada kepentingan bersama yang harus dihormati.” Pentingnya dialog sebagai *problem solving* dari situasi yang dihadapi diusulkan pula oleh Damardjati Supadjar lewat artikel pendek dalam kumpulan ini; *Dialog Antar Pemeluk Agama dan Penghayat Kepercayaan dalam Masyarakat Multikultur*.

Artikel terakhir adalah sebuah refleksi dari Arie Sujito tentang “keistimewaan Yogyakarta dan identitas keindonesiaan”. Wawasan keistimewaan, katanya, hendaknya dibangun dalam konteks bagaimana Yogyakarta merupakan daerah yang di dalamnya senantiasa menghargai perbedaan dalam keberagaman (etnik, agama, afiliasi politik) dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Berkait dengan itu, penguatan politik identitas dalam konstruksi keistimewaan menjadi bagian substansi kebangsaan dan keindonesiaan. Di sinilah diharapkan terjadinya dialog kebudayaan dan politik antara keistimewaan dan keindonesiaan secara berkelanjutan.

Semoga buku ini dapat membangkitkan inspirasi untuk membangun dialog yang intens menuju terwujudnya solidaritas kebangsaan yang menghargai kesetaraan dalam perbedaan untuk dapat hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Editor:

Sri Rahayu Budiarti
Muslimin A.R. Effendy

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ~ v

PENGANTAR EDITOR ~ vii

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

WACANA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA ~ 1

Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi Atas Budaya Masyarakat Indonesia ~ 3

Heddy Shri Ahimsa-Putra

BAGIAN KEDUA

MEDIA, TOLERANSI DAN IDENTITAS KEINDONESIAAN ~ 27

Media dan Isu Multikulturalisme ~ 29

Agus Maladi Irianto

Dialog dan Toleransi: Multikulturalisme di Kota Yogyakarta (Catatan Pengalaman) ~ 64

M. Nursam

Dialog Antar Pemeluk Agama dan Penghayat Kepercayaan dalam Masyarakat Multikultur ~ 83

Damardjati Supadjar

Politik Identitas, Keistimewaan Yogyakarta dan Keindonesiaan ~ 89

Arie Sujito

TENTANG PENULIS ~ 103

BAGIAN PERTAMA
WACANA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA



Pembukaan. (Atas) Suasana pembukaan Lokakarya Multikulturalisme Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, di Yogyakarta, 11 Agustus 2009. Tampak di baris depan (kiri-kanan) Guru Besar Antropologi UGM Prof. Heddy Shri Ahimsa Putra, MA. P.hD dan Dra. Christriyati, M. Hum. (kepala BPSNT Yogyakarta).

(Bawah) Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM. sedang memberikan keterangan kepada wartawan .



DARI PLURAL KE MULTIKULTURAL: TAFSIR ANTROPOLOGI ATAS BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA

Heddy Shri Ahimsa-Putra

Pengantar

Apa yang dipaparkan di sini merupakan hasil refleksi dan pengalaman penulis sebagai seorang Indonesia yang kebetulan menekuni antropologi, khususnya antropologi budaya, sebuah cabang ilmu pengetahuan yang obyek materialnya adalah kebudayaan. *Pertama* adalah bahwa pluralisme atau pluralitas, kemajemukan, tidaklah sama dengan multikulturalisme. Menyamakan keduanya akan membuat kita tidak dapat menganalisis dan memahami berbagai gejala sosial-budaya yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun peralihan dari abad ke-20 ke abad 21. Meskipun perbedaan antara pluralisme dan multikulturalisme sudah lama dikenal dalam ilmu-ilmu sosial di Barat, tidak demikian halnya di Indonesia. Kemajemukan di sini masih sering disamakan dengan multikulturalisme, padahal sebenarnya berbeda.

Kedua, kemajemukan masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan pola semenjak tahun 1970-an, setelah pembangunan dilakukan oleh pemerintah Orde Baru lewat beberapa kali tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Kemajemukan yang pada mulanya berpola seperti mosaik, mulai berubah menjadi kemajemukan dengan pola permadani. Dari satu sisi perubahan

pola ini terlihat sebagai perubahan yang positif, dari sisi yang lain perubahan ini juga mengandung unsur negatif.

Ketiga, kemajemukan masyarakat Indonesia kini juga terlihat cenderung menuju sebuah kemajemukan yang didasarkan pada simbol-simbol keagamaan, daripada kemajemukan yang didasarkan pada simbol-simbol kesukuan. Kemajemukan seperti ini mempunyai implikasi terhadap hubungan sosial di antara kelompok agama tersebut.

Keempat, meskipun Indonesia adalah sebuah masyarakat yang “bhinneka”, yang berbagai-bagai, yang terdiri dari ratusan sukubangsa dengan kebudayaan yang berbeda, namun hal itu tidak berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang multikultural. Multikulturalitas ini juga menjadi lebih sulit dicapai ketika kemajemukan yang dominan adalah kemajemukan atas dasar agama.

2. Pluralisme dan Multikulturalisme

Sudah sangat jelas bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk, baik secara sosial maupun budaya. Secara sosial kemajemukan itu terlihat dari begitu bervariasinya kategori-kategori sosial, kedudukan dan peran sosial, kelompok sosial, serta komunitas yang ada di Indonesia. Dari yang tradisional hingga yang modern. Secara budaya kemajemukan terlihat dengan jelas pada beranekaragamnya adat-istiadat, tradisi dan budaya ratusan sukubangsa di Indonesia, dan bangsa Indonesia tidak hanya sangat bangga dengan kemajemukan ini, tetapi juga telah menetakannya sebagai bagian dari identitas mereka lewat semboyan “bhinneka tunggal ika”. Meskipun demikian, kebanggaan dan pengakuan kebhinnekaan sebagai bagian dari identitas belumlah menjadi jaminan bahwa

kemajemukan tersebut akan dapat lestari dan bermanfaat. Jika tidak dikelola dengan baik, kemajemukan tersebut bisa berubah dari berkah, barokah, menjadi musibah, karena mendatangkan malapetaka. Di sinilah diperlukan pemahaman yang lebih baik, lebih sistematis mengenai kemajemukan tersebut.

a. Pluralisme (Kemajemukan) Sosial-Budaya

Sehubungan dengan itu, konsep-konsep penting untuk memahami masalah kemajemukan budaya juga perlu dimengerti dan dipahami dengan baik. Dua konsep yang sangat relevan dan penting di sini adalah konsep: *pluralisme* dan *multikulturalisme*. Konsep pluralisme menjadi populer dalam kajian masyarakat Asia Tenggara setelah Furnivall memakainya pada pertengahan abad ke-20 untuk menunjuk pada keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam sukubangsa yang hidup berdampingan walaupun tidak selalu saling mengenal dan saling memahami serta hidup di bawah satu sistem politik yang sama. Kontak yang terjadi di kalangan warga sukubangsa ini relatif terbatas, dan umumnya hanya terjadi di pasar atau karena kebutuhan praktis saja. Pasar menjadi sebuah arena untuk merajut relasi-relasi antarkelompok.

Kini, ada beberapa makna 'pluralisme' dalam studi mengenai masyarakat, dan para ilmuwan sosial tidak selalu sepakat mengenai makna ini. Van den Berghe (1970) telah memaparkan dengan cukup rinci perkembangan studi dan perbincangan tentang pluralisme ini dalam ilmu sosial. Di sini penulis menggunakan pandangan yang agak umum dan tidak begitu rumit mengenai 'pluralisme', yang penulis terjemahkan menjadi 'kemajemukan'. Terjemahan

ini sebenarnya kurang tepat, karena 'isme' yang ada dalam 'pluralisme' sebenarnya merujuk pada pandangan, pendapat atau pemikiran tertentu, namun untuk sementara masalah ini kita abaikan dulu.

Pluralisme dalam arti yang agak sederhana, sebagaimana dipaparkan oleh Van den Berghe menunjuk pada sejumlah ciri-ciri dari suatu masyarakat. Ciri-ciri tersebut antara lain, adalah; (1) adanya kelompok sosial atau kelompok budaya; yakni kelompok dengan budaya yang berbeda-beda; (2) kelompok ini hidup berdampingan (*coexist*) (3) dalam batas-batas dari sebuah *polity* atau kesatuan politik, dan, (4) memiliki sebuah sistem ekonomi bersama, yang membuat kelompok ini tergantung satu sama lain. Meskipun demikian kelompok ini sedikit banyak (5) bersifat otonom dan memiliki struktur kepranataan yang berbeda dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, seperti bidang kekerabatan, keagamaan, dan sebagainya.¹

Oleh karena itu, gambar sebuah masyarakat yang majemuk (*plural*) cukup mirip dengan 'mosaik'. Sebuah mosaik terdiri dari pecahan-pecahan dengan warna yang sebagian berbeda, sebagian mirip dengan yang lain. Pecahan-pecahan ini disatukan oleh perekat, dan keseluruhannya menampilkan sebuah gambar tertentu. Perekat ini bisa sangat kuat, bisa pula tidak. Jika mosaik ini pecah maka unsur-unsur yang membentuk mosaik tersebut akan terpisah-pisah lagi. Jadi, masyarakat yang plural, majemuk, adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya terlihat jelas

¹ P.L. van den Berghe, "Pluralism", J.J. Honigmann (ed.), *Handbook of Social and Cultural Anthropology* (New York: MacMillan, 1970).

pemisahan-pemisahan budaya (*cultural segregation*) dan pemisahan sosial, yang terjadi karena adanya perbedaan dalam budaya di antara kelompok yang membentuknya.

b. Multikulturalisme

Dalam wacana yang berkembang di Barat, terutama di Amerika Serikat, multikulturalisme tidaklah sama pengertiannya dengan pluralisme, sementara di Indonesia dua konsep yang berlainan ini diterjemahkan menjadi “kemajemukan”. Inilah salah satu penyebab mengapa wacana yang berkembang di Indonesia tentang multikulturalisme menjadi berbeda dengan yang ada di Barat, dan konsep multikulturalisme kehilangan makna strategisnya dan keefektifannya untuk membangun sebuah masyarakat yang multikultural, bukan hanya dalam arti plural (majemuk) saja, tetapi juga dalam arti yang lebih dalam dan bermakna.

Dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seorang ilmuwan Amerika Serikat, Lawrence A. Blum, mendefinisikan multikulturalisme sebagai “... *an understanding, a respect, a valuation of other people’s culture. It is a respect with a curiosity, an eagerness to know and understand that other culture. Although it is a respect, a valuation of cultural differences, it does not mean an agreement on all aspects or elements of that culture....*” (sebuah pemahaman, penghormatan dan penghargaan atas budaya orang lain, masyarakat lain. Sebuah penghormatan, penghargaan, yang disertai dengan keingintahuan, keinginan mengetahui dan memahami kebudayaan lain tersebut. Meskipun

itu adalah sebuah penghormatan, penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan budaya, hal itu tidak berarti menyetujui, menyetakati semua aspek atau unsur-unsur dari kebudayaan yang berbeda tersebut....)² Dalam pengertian seperti ini, multikulturalisme tidak lain adalah unsur dari seperangkat nilai-nilai tertentu.

Sebagai sebuah unsur dari seperangkat nilai, multikulturalisme tersebut mengandung tiga sub-nilai, yakni: “(a) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang; (b) menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; (c) menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.”³

Untuk menghindari salah pengertian Blum lebih lanjut menjelaskan, bahwa jenis penghormatan pada butir (b) dimaksudkan sebagai “penghormatan dengan pengetahuan (dan bukan tanpa kritik) yang didasarkan pada suatu pemahaman tentang kebudayaan lain. Ia meliputi upaya untuk melihat kebudayaan dari sudut pandang anggota-anggotanya dan khususnya untuk melihat bagaimana anggota-anggota dari kebudayaan itu menilai ekspresi dari kebudayaan mereka sendiri. Ia meliputi rasa tertarik

² L.A. Blum “Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai Yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural”, L.May, S.Collins-Chobanian, K.Wong (eds.), *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

³ *Ibid.*, hlm. 19.

yang aktif dan kemampuan dalam cara untuk memasuki dan menikmati ekspresi-ekspresi budaya dari kelompok-kelompok lain.”⁴

Jika multikulturalisme ini telah menjadi bagian dari sistem nilai dari suatu masyarakat, maka multikulturalisme di situ dapat dikatakan telah menjadi sebuah kesadaran sosial. Masyarakat yang multikultural adalah masyarakat yang jelas memiliki tradisi “memahami, menghormati dan menghargai budaya orang lain”. Multikulturalisme ini dikatakan lebih kuat bilamana penghormatan tersebut tidak hanya berhenti sampai pada penghormatan saja, tetapi juga tumbuh menjadi sebuah *“keinginan untuk memahami budaya masyarakat atau sukubangsa lain”*, termasuk di dalamnya *“sebuah penghargaan... bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut”* tetapi *“... mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri”*. Jika hal-hal ini telah berhasil dicapai oleh suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural, yang telah memiliki kesadaran multikultural, karena telah menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dari kesadaran sosial mereka.

Dengan pengertian pluralisme dan multikulturalisme seperti di atas, kita dapat mencoba memahami, seperti apa masyarakat Indonesia yang ada di masa kini? Apakah sebuah masyarakat yang plural sekaligus multikultural? Atau yang multikultural tetapi tidak plural? Atau yang plural tetapi tidak multikultural? Atau yang tidak keduanya?

⁴ *Ibid.*

3. Kemajemukan Indonesia: Seperti Apa?

Memandang masyarakat Indonesia lewat kacamata kemajemukan budaya perlu dilakukan dengan menggunakan kacamata sejarah, yang beranggapan bahwa tidak ada yang tidak berubah dalam kehidupan manusia. Perubahan adalah sebuah kepastian. Demikian pula halnya dengan kemajemukan sosial-budaya dalam masyarakat Indonesia. Kemajemukan ini terus-menerus akan berada dalam proses perubahan.

a. Kemajemukan Indonesia di Masa Lalu: Tipe Mosaik

Masyarakat Indonesia yang majemuk di masa lalu, sebagaimana yang dilihat oleh Furnivall, adalah sebuah masyarakat majemuk dengan “tipe mosaik”. Di situ berbagai macam sukubangsa yang ada dapat hidup berdampingan, tetapi ada pemisahan fisik yang cukup jelas di antara mereka. Suku-sukubangsa yang hidup di tengah masyarakat yang didominasi oleh sukubangsa tertentu akan tinggal dalam kelompok yang membentuk kantong-kantong (*enclave*) budaya. Mereka tinggal dalam sebuah permukiman sendiri. Kampung mereka akan dikenal dengan nama sukubangsa tersebut, misalnya kampung Melayu, kampung Ambon, kampung Jawa, Pecinan, dan sebagainya.

Sebagai sebuah negeri yang terdiri dari banyak pulau dan sukubangsa, situasi kesukubangsaan dan kebudayaan di Indonesia sangat kompleks, mungkin paling kompleks di muka bumi, karena hanya di Indonesialah begitu banyak kebudayaan dan agama yang tidak sama terdapat dalam sebuah negara. Demikian pula keadaan di berbagai lokasi di pulau yang sama. Variasinya begitu besar. Di beberapa tempat, terutama di kota-kota besar, pluralisme tipe mosaik

memang sudah tidak begitu terlihat lagi, tetapi di pelosok yang jauh dari daerah perkotaan, kemajemukan seperti di atas masih terlihat dengan jelas. Contoh yang paling mudah adalah daerah transmigrasi.

Di daerah-daerah transmigrasi tertentu mosaik sosial-budaya masih terlihat dengan jelas. Para transmigran terdiri dari beberapa sukubangsa yang menempati lokasi yang berbeda di daerah transmigrasi tersebut, dan mereka ini berbeda lagi dengan suku-sukubangsa lokal yang ada di sekitar daerah transmigrasi. Hubungan di antara mereka umumnya adalah hubungan ekonomi, namun mereka seolah-olah membentuk suatu kesatuan karena mereka tinggal dalam batas-batas wilayah dalam sebuah sistem politik tertentu, entah itu kecamatan atau kabupaten.

Kemajemukan di Indonesia di sini menunjuk pada dua macam kemajemukan, yakni; kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya, yang bisa juga disebut variasi sosial dan variasi budaya, atau heterogenitas sosial dan heterogenitas budaya. Kemajemukan sosial adalah adanya berbagai macam kategori, kelompok, golongan, lapisan, status sosial, relasi sosial, dan jaringan sosial dalam suatu masyarakat atau komunitas, sedang kemajemukan budaya adalah adanya berbagai macam perangkat nilai, kepercayaan, pandangan hidup, norma, aturan-aturan dalam sebuah masyarakat atau komunitas, yang dianut oleh kelompok, lapisan, atau golongan sosial yang berbeda-beda.

b. Kemajemukan: Berkah dan Masalah

Kemajemukan sosial dan budaya dalam kehidupan

manusia, pada dasarnya adalah sebuah gejala yang sudah sangat biasa. Bahkan merupakan salah satu hakekat dari kehidupan itu sendiri. Dalam sejarahnya manusia telah mengenal beraneka-ragam perbedaan. Mulai dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, perbedaan ciri-fisik, perbedaan perilaku hingga perbedaan lain yang lebih abstrak dan rumit. Meskipun demikian, berbagai macam perbedaan ini tidak selalu menimbulkan masalah. Jadi, kemajemukan sosial dan budaya sebenarnya adalah sebuah gejala yang netral dan sangat wajar. Dalam kondisi tertentu, kemajemukan ini bisa merupakan berkah, namun dalam kondisi yang lain, kemajemukan ini bisa membawa masalah.

Kemajemukan Sebagai Berkah. Di Indonesia kemajemukansosial-budayapernahdankinimasihdipandang sebagai berkah, walaupun setelah terjadinya berbagai macam konflik sepuluh tahun yang lalu, kemajemukan tersebut mulai dirasakan sebagai masalah. Akan tetapi pada masa sebelumnya, hingga kini kemajemukan ini masih merupakan salah satu ciri yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Kemajemukan ini juga masih dapat dipandang sebagai berkah, karena dengan kemajemukan budaya tersebut Indonesia memiliki sebuah modal yang sangat besar untuk mengembangkan pariwisata budaya. Selain itu, budaya yang begitu beranekaragam pada dasarnya juga merupakan sebuah khasanah atau perbendaharaan pengetahuan yang sangat berharga dan sangat penting, bilamana kita dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik dan tepat.

Kemajemukan Sebagai Masalah. Kemajemukan mulai dirasakan sebagai sebuah masalah kebangsaan dalam

sepuluh tahun terakhir, ketika konflik antarkelompok, antarsuku dan antarpemeluk agama terjadi di berbagai tempat secara hampir serempak dan terasa begitu mengancam kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pada saat itu kita orang Indonesia seolah-olah tersadar dari sebuah mimpi indah mengenai keanekaragaman budaya yang selama ini kita banggakan. Keanekaragaman tersebut dalam beberapa tahun terakhir ternyata telah menjadi salah satu sumber malapetaka yang meninggalkan bekas begitu mendalam di kalangan sebagian warga Indonesia. Ternyata tidak setiap orang di antara kita siap menerima dan menghargai perbedaan yang ada manakala perbedaan tersebut membawa akibat yang kurang menguntungkan terhadap penguasaan sumber-sumber daya tertentu.

Meskipun demikian, terlepas dari persoalan berkah atau masalah, kemajemukan sosial dan budaya di Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak atau diabaikan. Kemajemukan tersebut harus diterima, dikelola dan dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa Indonesia sendiri.

c. Kemajemukan Indonesia di Masa Kini: Tipe Permadani?

Setelah kemerdekaan, kemajemukan tipe mosaik di atas mulai mengalami perubahan, namun di masa Orde Lama garis-garis pemisah antarsuku masih terasa kuat. Kini garis-garis tersebut telah mulai banyak mengabur, walaupun di beberapa tempat masih tetap kuat. Yang jelas pernikahan antarsuku di kalangan orang Indonesia kini semakin banyak terjadi, dan orang tidak lagi begitu mempersoalkan perbedaan sukubangsa. Ini merupakan indikator yang

paling jelas dari semakin mengaburnya batas-batas sosial yang berdasarkan kesukubangsaan.

Kantong-kantong budaya seperti kampung Melayu, kampung Ambon, kampung Jawa, Pecinan, dan sebagainya tidak lagi semata-mata menjadi tempat tinggal suku-suku bangsa tersebut. Warga sukubangsa yang lain kini banyak tinggal di daerah-daerah seperti itu, yang batas-batas fisiknya juga semakin mengabur, karena sistem pemerintahan di tingkat lokal semakin menguat, yang membuat kantong-kantong budaya semacam itu kemudian lebih terbagi menjadi satuan-satuan administrasi pemerintahan dari pada satuan-satuan atas dasar kesukubangsaan. Ciri-ciri budaya kesukuan juga mengabur dalam kantong-kantong budaya seperti ini.

Hal yang sama terjadi di berbagai daerah yang semula dikenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya adalah sukubangsa tertentu saja. Adanya program transmigrasi, membaiknya sarana transportasi antarpulau dan daerah di Indonesia, yang mendorong meningkatnya mobilitas geografis penduduk Indonesia, telah membuat batas-batas kebudayaan antarsukubangsa semakin mengabur. Kota Yogyakarta misalnya, bukan lagi sebuah kota yang hanya dihuni oleh orang Jawa, dengan budaya Yogjanya. Kota ini, bagi sementara orang, telah berubah menjadi sebuah Indonesia mini, seperti halnya kota-kota besar di Indonesia lainnya.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan telah mengubah wajah pluralisme Indonesia dari tipe mosaik ke tipe permadani. Artinya, kemajemukan budaya masih tetap ada di Indonesia,

tetapi kemajemukan ini tidak lagi berupa pecahan-pecahan yang dihubungkan oleh perekat tertentu, tetapi lebih mirip benang-benang yang saling menyilang dan menjalin satu sama lain, membentuk sebuah permadani budaya dengan gambar dan warna yang beranekaragam. Batas-batas sosial-budaya masyarakat di Indonesia semakin mengabur, tetapi tidak sepenuhnya hilang.

Kalau dari sisi budaya, garis-garis ini semakin mengabur, tidak demikian halnya dengan garis-garis budaya yang lain, yang didasarkan pada agama. Sulit diingkari bahwa dalam dua dasawarsa terakhir, di kalangan pemeluk agama-agama tertentu di Indonesia telah muncul simbol-simbol budaya yang menegaskan kembali identitas keagamaan, yang menguatkan sentimen-sentimen keagamaan. Penegasan simbol-simbol keagamaan ini mungkin tidak akan menimbulkan masalah bilamana tidak disertai dengan ketidakmampuan untuk menghargai dan menghormati ekspresi-ekspresi budaya dari kelompok yang berbeda. Sebaliknya, perlu juga disadari bahwa pemunculan simbol-simbol keagamaan ini sebenarnya juga merupakan reaksi terhadap ketidakpekaan, ketidakmampuan dari pihak-pihak tertentu untuk menghormati dan menghargai budaya kelompok tersebut.

Di masa kini, garis-garis pemisah antaragama—yang masih terasa kabur di masa Orde Lama—kini justru terasa semakin jelas. Identitas keagamaan kini rasanya menjadi lebih penting daripada identitas kesukuan, dan pernikahan antarindividu yang berbeda agama lebih menjadi persoalan di masa kini daripada di masa yang lalu. Jika hasil pengamatan ini benar, maka sangat mungkin mosaik budaya Indonesia

di masa depan bukan lagi mosaik budaya yang bersumber pada budaya sukubangsa tetapi mosaik budaya yang bersumber pada agama. Ini juga akan berarti bahwa mosaik tersebut akan lebih sederhana, karena sedikit jumlahnya, namun pada saat yang sama juga lebih kelihatan tegas batas-batasnya. Mosaik budaya sukubangsa mungkin tidak akan hilang sama sekali, tetapi semakin membentuk sebuah permadani budaya yang menjadi latar-belakang dari mosaik budaya agama tersebut.

4. Masyarakat Indonesia: Plural tetapi Belum Multikultural?

Meskipun orang Indonesia umumnya bangga akan kebhinnekaan budaya di Indonesia, namun berbagai konflik antarkelompok dan antarsuku yang kini merebak pada dasarnya menunjukkan bahwa kebanggaan tersebut tampaknya hanya berlaku di kalangan tertentu, pada lapisan sosial tertentu, yakni lapisan menengah atas. Pada lapisan sosial bawah kebanggaan ini sebenarnya masih tipis, dan tidak didasarkan pada pemahaman yang cukup mendalam atas variasi-variasi budaya yang ada. Oleh karena itu, kebanggaan tersebut langsung sirna manakala kepentingan kelompok atau golongan terancam oleh kehadiran kelompok atau golongan lain. Nilai-nilai multikultural dengan mudah akan disingkirkan karena dipandang tidak relevan, jika tidak melemahkan atau merugikan.

Berbagai konflik tersebut seolah-olah menegaskan pada kita bahwa masyarakat kita memang plural, majemuk, tetapi belum multikultural. Kesadaran multikultural masyarakat kita masih tergolong rendah. Selain itu, rendahnya multikulturalisme masyarakat kita juga tercermin antara lain pada hal-hal berikut;

a. Kurangnya pemahaman mengenai budaya/agama lain

Warga masyarakat kita umumnya kurang memahami budaya lain, dan ini tidak terlalu mengherankan, karena pemahaman mereka tentang budaya sendiri ternyata umumnya juga masih rendah. Misalnya saja, di kalangan orang Jawa. Walaupun bahasa Jawa jelas-jelas diketahui memiliki tiga tingkatan (*ngoko*, *krama madya* dan *krama inggil*) namun ternyata tidak semua orang Jawa dapat menggunakan tiga tingkatan bahasa tersebut dengan baik. Kalau pengetahuan mengenai media komunikasi dalam budaya sendiri ini saja sudah rendah, apalagi pengetahuan mengenai unsur budaya lain yang tidak sepenting bahasa; apalagi pengetahuan mengenai unsur-unsur budaya yang ada dalam kebudayaan lain.

Walaupun seseorang hidup berdampingan dengan atau di tengah masyarakat lain, hal itu tidak serta merta membuatnya memahami kebudayaan dari masyarakat di mana dia berada, apalagi kalau masyarakat ini berasal dari masa lampau. Banyak orang Jawa yang telah tinggal di tengah masyarakat Aceh, masyarakat Minang, masyarakat Bali, dan sebagainya, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi seberapa dalam dan luas pengetahuan mereka tentang budaya-budaya dari masyarakat tempat mereka berada? Tidak dalam. Itu kesan yang berhasil penulis peroleh setelah bertemu dengan warga dari berbagai macam sukubangsa yang tinggal di tengah sukubangsa yang lain.

Kurangnya pemahaman mengenai budaya lain ini tidak hanya budaya yang berbeda ruang, tetapi juga yang berbeda waktu. Banyak dari kita telah melihat Candi Borobudur dan Candi Prambanan, telah melihat kraton,

tetapi seberapa banyak dari mereka yang telah berkunjung tersebut kemudian mengetahui dan memahami budaya masyarakat pembuat candi-candi tersebut atau mengetahui tentang budaya kraton? Berapa banyak warga masyarakat kita yang berminat pada sejarah atau gemar mengunjungi museum untuk melihat budaya masyarakat sendiri yang hidup di masa yang berbeda? Seberapa besar minat kita membangun museum mengenai masyarakat di masa lampau dan masyarakat di masa kini (yang suatu saat akan menjadi masyarakat masa lampau)? Kurangnya minat pada budaya di masa lampau dan budaya masyarakat lain di masa kini jelas terlihat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, dan ini merupakan tanda-tanda dari rendahnya kesadaran multikultural dalam masyarakat kita.

b. Kurangnya keinginan untuk mempelajari budaya/agama lain

Warga masyarakat kita umumnya kurang tertarik untuk mempelajari dan memahami budaya-budaya yang dimiliki oleh sukubangsa lain. Jika ada upaya semacam itu, ini dilakukan tidak secara sistematis sehingga pemahaman yang diperoleh juga seringkali masih diwarnai etnosentrisme yang kuat. Kebanyakan orang lebih tertarik mempelajari budaya sendiri. Keinginan untuk mempelajari masyarakat atau budaya lain hanya tumbuh di kalangan tertentu, terutama mereka yang memang mempelajari masyarakat dan kebudayaan. Inipun tidak banyak.

Pengalaman penulis bertemu dengan pelajar dan peminat kebudayaan menghasilkan kesan bahwa pada umumnya mereka berminat untuk mempelajari kebudayaan dan masyarakat mereka lebih dulu. Ini juga terjadi di

kalangan mahasiswa antropologi yang semestinya memiliki minat paling besar untuk mengetahui dan memahami budaya-budaya di luar masyarakatnya sendiri. Mungkin juga rendahnya minat mempelajari budaya lain ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk melakukan penelitian di kalangan sukubangsa yang berbeda budayanya.

c. Kurangnya penghargaan terhadap budaya/agama lain

Kurangnya pemahaman serta keinginan mempelajari budaya lain telah membuat penghargaan kita terhadap budaya-budaya berbagai macam sukubangsa lain juga tidak begitu tinggi. Etnosentrisme umumnya masih kuat melekat dalam diri kita, dan ini biasanya tercermin cukup jelas, dan diwujudkan tanpa malu-malu, dalam berbagai macam komentar yang bernada “miring” mengenai adat-istiadat sukubangsa lain. Bahkan pandangan yang kurang enak ini seringkali juga menimpa kesenian-kesenian sukubangsa tertentu, padahal kesenian merupakan ekspresi dari ide dan rasa tentang keindahan dari suatu masyarakat tertentu lewat gerak, suara atau bebunyian. Seringkali pula kurangnya penghargaan terhadap budaya lain ini terwujud dalam bentuk puji-pujian berlebihan yang diberikan kepada kebudayaan sendiri.

Kita masih dapat menambahkan berbagai contoh lain mengenai tingkat multikulturalisme yang rendah dari masyarakat kita, asal saja kita bersedia memperhatikan berbagai hal di sekeliling kita dengan teliti dan merenungkannya. Ada baiknya memang kita melakukan penelitian empiris dan serius mengenai tingkat multikulturalisme di Indonesia, karena orang Indonesia cenderung beranggapan bahwa

mereka sudah terbiasa hidup dalam perbedaan, dalam kemajemukan, dan merasa bangga karenanya, sehingga kemudian beranggapan bahwa tingkat kemultikulturalan mereka tidak perlu diragukan lagi. Padahal, hidup di tengah masyarakat yang penuh perbedaan ternyata tidak selalu disertai dengan sikap hidup yang lebih menghormati dan menghargai perbedaan tersebut.

d. Multikulturalisme Rendah: Lapisan Sosial Mana?

Jika multikulturalisme sepakat kita definisikan sebagai seperangkat nilai-nilai tertentu, yang tampaknya masih baru bagi kebanyakan warga masyarakat kita, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah tingkat multikulturalisme yang rendah tersebut ada pada semua lapisan dalam masyarakat atau hanya lapisan-lapisan sosial tertentu saja? Kalau nilai-nilai multikulturalisme merupakan perangkat nilai yang sebagiannya termasuk baru bagi kita, dan nilai-nilai ini umumnya lebih dikenal dalam dunia pendidikan formal, maka kesimpulan sementara yang dapat kita tarik adalah bahwa lapisan sosial, kelompok atau golongan yang relatif kurang tersentuh oleh pendidikan formallah yang cenderung masih rendah tingkat multikulturalismenya.

Berbagai konflik yang telah terjadi sedikit banyak mendukung pandangan ini, walaupun di lokasi-lokasi tertentu atau pada kasus-kasus tertentu pendapat ini tidak terbukti sama sekali. Konflik-konflik yang terjadi selama ini tampaknya (secara umum) melibatkan mereka yang berada dalam lapisan sosial bawah atau menengah ke bawah, yang dalam peta pendidikan Indonesia merupakan lapisan yang juga rendah tingkat pendidikannya. Pada lapisan inilah

menurut pengamatan penulis kesadaran multikultural relatif lebih rendah dibandingkan dengan lapisan sosial yang lain. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan masyarakat di beberapa negara maju, secara keseluruhan tingkat multikultural masyarakat kita tampaknya memang lebih rendah. Tentu untuk memastikan kebenaran kesan ini diperlukan penelitian ilmiah yang lebih serius dan mendalam.

5. Membangun Kesadaran Multikultural

Apabila kita sepakat bahwa multikulturalisme merupakan perangkat nilai-nilai yang diperlukan bagi sebuah bangsa yang begitu majemuk seperti Indonesia, pertanyaan kita selanjutnya adalah: mungkinkah kita merajut multikulturalisme di Indonesia? Apa kira-kira strategi yang perlu ditempuh untuk merajut permadani multikulturalisme tempat kita bisa duduk lesehan bersama?

a. Membangun Kesadaran Baru

Multikulturalisme sebagai perangkat nilai yang kita pandang baik hanya akan dapat menghasilkan kehidupan yang baik bilamana nilai-nilai tersebut kita jadikan pedoman dalam kita berperilaku, dalam berinteraksi, dengan individu-individu yang lain. Dalam masyarakat yang kurang mengenal nilai-nilai multikulturalisme, nilai-nilai ini jelas merupakan perangkat nilai baru, yang belum tentu mudah diterima. Agar nilai-nilai ini dapat menjadi bagian dari perangkat nilai yang ada, perlu dibangun sebuah kesadaran baru dalam masyarakat, yang akan memungkinkan masyarakat kita merajut jejaring makna-makna yang baru melalui kesadaran

tersebut. Lewat jejaring ini pulalah makna-makna baru mengenai apa yang ada di sekitar kita kemudian kita rajut, membentuk jejaring makna yang lebih luas lagi.

Jejaring nilai multikulturalisme ini pada akhirnya harus menghasilkan kesadaran-kesadaran baru sebagai berikut;

b. Kesadaran Tentang Keburukan Etnosentrisme

Dengandilontarkannyaperangkatnilai multikulturalisme di atas, maka kini etnosentrisme yang dapat didefinisikan sebagai pandangan yang mengatakan bahwa penggunaan kerangka pemikiran, perangkat pengetahuan, perangkat nilai yang berasal dari sukubangsa sendiri untuk menilai segala sesuatu sebagai tindakan yang benar atau paling benar harus ditinjau kembali, bahkan harus ditafsirkan sebagai hal yang negatif, sebab nilai-nilai dalam etnosentrisme boleh dikatakan bertolak-belakang dengan nilai-nilai multikulturalisme.

Etnosentrisme perlu dipandang sebagai perangkat nilai yang akan membawa suatu masyarakat atau komunitas menuju ke eksklusivisme, yang kemudian akan semakin mempertegas batas-batas sosio-kultural komunitas tersebut dengan komunitas yang lain, dan ini akan semakin mempersulit terciptanya sebuah integrasi sosial yang sehat, yang didasarkan pada saling membutuhkan dan pertukaran. Etnosentrisme yang tidak disadari juga akan membawa seseorang pada sikap mengagungkan budaya sendiri, merendahkan budaya lain, kurang penghargaan terhadap budaya lain, yang kemudian akan membawa pada sikap kurang menghargai terhadap masyarakat pendukung budaya tersebut.

c. Kesadaran Tentang Pentingnya Nilai-nilai Multikulturalisme

Nilai-nilai multikulturalisme kemudian juga perlu dipahami dengan baik dan perlu dipandang sebagai perangkat nilai yang lebih cocok bagi sebuah masyarakat yang terdiri dari banyak sukubangsa, seperti Indonesia. Orang harus lebih menyadari perlunya mengetahui, memahami serta menghargai pendapat yang berbeda; memahami dan menghargai budaya yang berbeda, sehingga kecenderungan penilaian secara etnosentris akan dapat dikurangi.

Orang juga perlu menyadari bahwa nilai-nilai multikulturalismelah yang kemudian akan memungkinkan kemajemukan budaya tetap ada dan dihargai, dan pemahaman serta penghargaan terhadap budaya-budaya yang berbeda harus dilakukan secara sadar dan sistematis. Hanya dengan pemahaman seperti inilah benang-benang nilai multikulturalisme akan dapat dirajut bersama menjadi permadani multikulturalisme, yang di atasnya setiap sukubangsa, kelompok dan golongan dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menikmati hidangan berupa keanekaragaman budaya.

d. Kesadaran Tentang Perlunya Kepekaan Sosial-Kultural (Tepa-Slira)

Perangkat nilai multikulturalisme juga diharapkan akan dapat membuat orang lebih peka, lebih mampu merasakan perlunya perangkat nilai *tepa-selira* dalam kehidupan bersama dengan mereka yang berbeda dalam budaya dan pandangan hidupnya. Bahwa kalau kita tidak suka dipukul, sebaiknya kita juga tidak memukul; bahwa kalau kita tidak suka diperlakukan dengan cara tertentu, orang

lain juga demikian. Dengan berpedoman pada prinsip *tepa selira* setiap orang akan lebih berhati-hati dan lebih bisa menghargai orang lain, kelompok lain, atau budaya lain.

Kepekaan sosio-kultural juga akan dapat mencegah orang bersikap melecehkan atau memandang rendah budaya lain yang berbeda, atau yang tampak lebih sederhana. Sikap melecehkan tidak hanya bisa menjangkiti warga suatu kebudayaan dominan di suatu daerah, tetapi juga warga suatu lapisan sosial yang memiliki budaya eksklusif dan merasa lebih tinggi atau diperlakukan lebih tinggi daripada lapisan sosial yang lain. Kesadaran multikultural kiranya akan dapat membuat pendukung suatu budaya tertentu menjadi lebih arif, dan lebih mampu menghargai budaya lain yang berbeda, meskipun budaya tersebut terlihat jauh lebih sederhana.

6. Penutup

Penulis ingin mengajukan pendapat sementara yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman sehari-hari bahwa, *pertama*; pemahaman mengenai pluralisme dan multikulturalisme di kalangan ilmuwan sosial-budaya Indonesia masih belum tepat. Masih terjadi kerancuan dalam menggunakan konsep-konsep pluralisme dan multikulturalisme. Kerancuan ini tampaknya telah membuat analisis dan pemahaman kita mengenai masyarakat Indonesia juga kurang tepat, kurang rapi dan kurang sistematis. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin cara kita menangani berbagai masalah kemajemukan budaya juga tidak akan tepat, jika tidak akan merugikan sama sekali.

Kedua, masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat plural, masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam sukubangsa dan kebudayaan, *tetapi kurang multikultural*. Hal ini terlihat dari masih rendahnya keinginan di kalangan warga masyarakat kita untuk mengenal, mengetahui dan mengerti budaya-budaya lain, serta dari rendahnya pemahaman serta penghargaan terhadap budaya-budaya yang berbeda. Kesadaran multikultural yang paling rendah tampaknya terdapat pada lapisan sosial yang paling rendah juga. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditempuh langkah-langkah yang dapat meningkatkan multikulturalisme dalam masyarakat kita.

Ketiga, oleh karena multikulturalisme merupakan suatu perangkat nilai yang relatif baru bagi masyarakat kita, maka diperlukan upaya-upaya untuk membangun nilai-nilai ini dalam masyarakat agar (a) etnosentrisme tidak tumbuh subur di dalamnya; (b) masyarakat memahami dan menerima nilai-nilai multikulturalisme, dan (c) masyarakat memiliki kepekaan yang lebih tinggi berkenaan dengan perbedaan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, H.S.

- 1999a *Memahami Keanekaragaman Budaya Untuk Persatuan Bangsa*. Makalah Bimbingan Teknis Penganalisisan dan Pembinaan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- 1999b *Pola Komunikasi Budaya Antaretnis di Indonesia*. Makalah Bimbingan Teknis Sosial Budaya, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

- 2000a *Dari Mosaik Budaya ke Permadani Budaya*. Makalah dalam semiloka.
- 2000b *Inisiatif Lokal dan Kearifan Lokal Untuk Rekonsiliasi: Masihkah Efektif?*. Makalah seminar.
- 2001 *Dari Mosaik Budaya ke Permadani Budaya*. Makalah seminar.

Blum, L.A.

- 2001 "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai Yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural", *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*, L.May, S.Collins-Chobanian, K.Wong (eds.). Penyunting: Sinta Carolina. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Despres, L.A.

- 1975 "Introduction", *Ethnicity and Resource Competition in Plural Societies*, L.A.Despres (ed.). The Hague: Mouton.

Van den Berghe, P.L.

- 1970 "Pluralism", *Handbook of Social and Cultural Anthropology*, J.J. Honig-mann (ed.). New York: MacMillan.



Prof. Dr. Damardjati Supadjar (kiri depan berpeci) di tengah peserta yang lain. Lokakarya ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat; sebuah contoh betapa keragaman bisa menjadi simpul pemersatu bangsa.

BAGIAN KEDUA
EDIA, TOLERANSI DAN INDENTITAS KEINDONESIAAN



Diskusi. Banyak peserta memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada pemakalah seperti tampak pada kedua foto ini (atas-bawah).



MEDIA DAN MULTIKULTURALISME

Agus Maladi Irianto

Perubahan cepat dalam teknologi informasi saat ini telah mengubah kebudayaan sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di seluruh dunia telah mampu melakukan transaksi ekonomi dan memperoleh informasi dalam waktu singkat berkat teknologi satelit dan komputer. Kini pun kita masuk dalam ikatan kebudayaan global.

Corak kebudayaan global telah membebaskan manusia. Perubahan kebudayaan lokal dan sosial akibat revolusi informasi ini tidak dapat dielakkan. Masyarakat perkotaan yang memiliki akses terhadap informasi merupakan kelompok masyarakat yang langsung terkena pengaruh kebudayaan global. Masyarakat perkotaan dipengaruhi terutama melalui reproduksi narasi yang dilakukan oleh media massa secara cepat. Media memberi kontribusi yang cukup besar dalam mengkonstruksi realitas tersebut dan konstruksi tersebut tidak selamanya bertahan. Dalam waktu yang berubah secara cepat, media juga tak jarang kemudian mendekonstruksi, dan merekonstruksi realitas.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat konsumen Indonesia mutakhir tumbuh beriringan dengan sejarah globalisasi ekonomi dan transformasi kapitalisme konsumsi yang ditandai dengan menjamurnya pusat perbelanjaan bergaya seperti *shopping*

mall, dan industri-industri; waktu luang, mode atau *fashion*, kecantikan, kuliner, nasihat, gosip, kawasan huni mewah, apartemen, iklan barang-barang mewah merek asing, makanan instan (*fast food*), serta reproduksi dan transfer gaya hidup melalui iklan dan media.

Gambaran tersebut terjadi di banyak masyarakat perkotaan Indonesia. Kebudayaan dalam hal ini tidak sekadar disikapi sebagai keseluruhan pola perilaku dan pemikiran kelompok sosial masyarakat secara mapan. Kebudayaan bukan dipandang sebagai suatu realitas kebendaan yang selalu tetap, tetapi ia telah membentuk realitas yang selalu diproduksi dan direproduksi secara terus menerus terhadap suatu kelompok sosial masyarakat. Di sinilah media menjadi arena dari sebuah konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi kebudayaan. Yang kemudian melahirkan identitas- identitas baru. Dari aspek waktu, identitas bukanlah suatu wujud yang sudah ada sejak semula dan tetap bertahan dalam suatu esensi yang abadi. Sedangkan dilihat dari aspek ruang, ia juga bukan hanya satu atau tunggal, tetapi terdiri dari berbagai lapisan identitas. Lapis-lapis identitas itu tergantung pada peran-peran yang dijalankan, keadaan objektif yang dihadapi serta ditentukan pula dari cara menyikapi keadaan dan peran tersebut.

Identitas bukanlah suatu yang selesai dan final, tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu disesuaikan kembali, sifat yang selalu diperbaharui, dan keadaan yang dinegosiasi terus-menerus, sehingga wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya. Identitas pada saat ini menjadi semakin baur dengan kepentingan-kepentingan yang justru lebih mengemuka. Pluralitas pada perkembangan saat ini tidak lagi hanya dibatasi pada perbedaan etnis, profesi, latar

belakang pendidikan, serta asal usul daerah. Pluralitas pada perkembangan saat ini justru lebih menunjuk pada persoalan kepentingan-kepentingan. Seseorang bisa berbeda dengan orang lain, bukan lantaran dia berasal dari etnis yang berbeda, profesi yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan asal usul daerah yang berbeda, namun berangkat dari kesamaan kepentingan masing-masing orang kemudian menyatukan identitas tersebut.

Kontruksi Media

Kepentingan yang paling nyata pada perkembangan saat ini, dapat diperhatikan pada interaksi dan negosiasi antarindividu yang dikonstruksi media massa—terutama industri penyiaran televisi. Keberadaan televisi nyaris menyergap kita sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Dan, sejalan itu pula televisi telah membentuk kebudayaan massa yang serba cepat. Apalagi, setiap program tayangan televisi memuat strategi komunikasi agar mampu memelihara atau mengubah sikap atau pendapat sasaran demi kepentingan sumber pembuat strategi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa televisi ini cenderung mengajak *audience*-nya agar patuh kepada pihak yang menguasai modal komunikasi, baik dalam konteks politik maupun ekonomi.¹

Sejumlah penayangan melalui stasiun televisi sangat strategis dan efektif untuk mempengaruhi *audience*-nya. Pada pemerintahan Orde Baru misalnya, TVRI—sebagai satu-satunya stasiun televisi—justru dijadikan alat propaganda pemerintah yang strategis dan efektif. Pada waktu itu, pemerintahan Orde

¹ John Fiske, *Television Culture* (London: Routledge, 1987).

Baru melalui Departemen Penerangan begitu menguasai dan mengendalikan media penyiaran televisi dalam setiap isi tayangannya yang serba negara. Setelah Orde Baru—seiring dengan terbukanya kebebasan politik di Indonesia—orientasi pada ekonomilah yang dijadikan “kiblat” bagi para pemilik modal untuk mengendalikan isi siaran televisi. Atas nama pengembalian investasi, para pemodal berkompetisi dan isi siaran televisi dijadikan strategi. Isi siaran televisi Indonesia pun berubah, dari serba negara bergerak pada determinasi ekonomi.

Bertolak dari kenyataan tersebut, dapat diyakini bahwa sajian acara televisi telah melibatkan sejumlah kepentingan. Bahkan, ia tidak saja semata-mata atas pemodal yang mempunyai jam siaran atau kepentingan negara yang berwenang melakukan regulasi siaran, tetapi juga melibatkan kepentingan sejumlah institusi lain. Sebut saja, rumah produksi, lembaga survei penonton, biro iklan, atau perusahaan yang ingin mempromosikan merek dagangannya. Bahkan, partai politik, organisasi massa, organisasi keagamaan yang mengatasnamakan mewakili *audience*, juga berkepentingan merespons program acara televisi tersebut. Untuk itulah, Fairclough menyebut proses tersajinya program acara televisi ini sebagai “*hegemonic struggle*” (pertarungan hegemoni)², sedangkan Fiske (1987) mengistilahkannya sebagai “*an arena for struggle for meaning*” (arena pertarungan makna)³, dan Littlejohn menyebutnya sebagai “*a struggle among ideologies*” (sebuah pertarungan di antara ideologi).⁴

² Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis* (New York: Longman Group Limited, 1995).

³ John Fiske, *loc.cit.*

⁴ Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication* (Belmont: Communication. Wadworth Publishing Company, 1996).

Media penyiaran televisi pada dasarnya merupakan sumber pengetahuan populer bagi kita untuk saling berhubungan dalam wilayah yang tidak terbatas. Televisi menjadi bagian dari, “prakondisi dan konstruksi selektif pengetahuan sosial yang kita gunakan untuk mempersepsi ‘realitas’ kehidupan orang lain, dan secara imajiner mengkonstruksi hidup kita dan mereka menjadi semacam ‘keseluruhan dunia’ yang masuk akal bagi kita”⁵.

Demikian juga menurut Graeme Turner (1991), sajian acara televisi pada dasarnya mengakomodasi praktek sosial, yang senantiasa memproduksi representasi realitas sosial. Sebagai sajian acara televisi mampu memproduksi representasi realitas sosial, maka ia telah melibatkan interaksi dan negosiasi yang kompleks dan dinamis dari sejumlah pelaku. Interaksi dan negosiasi itu, bekerja melalui tiga tahap, yakni, tahap prapenayangan, penayangan, maupun pasca penayangan.

Pada tahap pra-penayangan misalnya, akan melibatkan rumah produksi, lalu tahap penayangan, akan melibatkan kepentingan sejumlah institusi lain seperti stasiun televisi, biro iklan, perusahaan pemasang iklan, serta kepentingan lembaga penentu survei penonton. Sedangkan pada tahap pasca-penayangan, juga akan melibatkan kepentingan sejumlah institusi dan individu. Sebut saja, kepentingan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatasnamakan institusi independen bentukan negara untuk memantau isi siaran, serta lembaga survey penonton. Bahkan pada tahap pasca-penayangan, sajian acara televisi juga akan mendapat reaksi dari sejumlah institusi, seperti partai politik,

⁵ Stuart Hall, “The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions of Our Times”, dalam K. Thompson (ed.), *Media and Cultural Regulations* (London: Sage, 1977), hlm. 140 .

organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, atau lainnya. Dari sinilah, proses tarik menarik kepentingan—baik politik, ekonomi, maupun kepentingan yang lain—di antara para pelaku tindakan yang memproduksi dan yang merespons sajian acara televisi akan terlihat. Proses tarik menarik kepentingan tersebut bisa berbentuk kerja sama atau bahkan berupa konflik.⁶

Tarik menarik kepentingan itulah yang membentuk politik informasi media televisi. Katakanlah, ketika isi siaran televisi dikuasai pemegang ekonomi politik informasi (*political-economy of information*), maka informasi menjadi alat kepentingan para subjek pelaku media untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Para penguasa ekonomi ini kemudian berperan menjadi perumus realitas (*definer of reality*). Artinya, ideologi atau kepentingan para subjek pelaku media akan menelusup melalui tayangan yang diproduksi dan direproduksinya. Apalagi, tayangan yang diproduksi dan direproduksi stasiun televisi tersebut merupakan salah satu teks utama televisi. Sebagai salah satu teks, tayangan televisi bukan hasil rangkaian realitas, melainkan representasi yang terseleksi dan terkonstruksi serta menjadi bagian yang turut membentuk realitas.⁷

Terseleksi dan terkonstruksinya realitas tersebut, ditentukan oleh pengetahuan dan tindakan para subjek pelaku tindakan

⁶ Dennis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* (London: Sage Publications, 2000).

⁷ Chris Barker, *Television, Globalization and Cultural Identities* (Philadelphia Buckingham: Open University Press, 1999); Tony Bennet, "Media, Reality Signification", dalam Michel Gurevitch (ed.), *Culture, Society and the Media* (Metheun, 1982); Peter Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. (Jakarta: LP3ES, 1990); Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika* (Bandung: Jalasutra, 2004).

yang terlibat dalam media. Dengan demikian, kenyataan subjektif yang berasal dari pengetahuan dan tindakan subjek pelaku media akan lebih mewarnai sajian acara televisi. Di sisi lain, para pelaku media secara subjektif juga dapat mengubah kategori persepsi dan apresiasi yang mengendalikan berbagai pandangannya tentang realitas sosial melalui tayangan acara televisi tersebut.⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tersajikan acara televisi pada dasarnya lebih ditandai oleh praktek-praktek sosial para pelaku dalam rangka berinteraksi dan bernegosiasi dengan pelaku yang lain. Dalam praktek-praktek sosial para pelaku itulah, sejumlah pelaku melalui relasi-relasi yang ada akan bersaing, berjuang, dan saling mengalahkan, yang secara langsung maupun tidak menandai bekerja dan berkontestasinya kekuasaan. Atau dengan kata lain, bekerja dan berkontestasinya kekuasaan tidak dilihat sebagai gambaran yang menampilkan para kontestan dalam konstelasi yang statis.⁹ Ia lebih dilihat sebagai proses interaksi dan negosiasi yang di dalamnya kekuasaan bekerja dan berpengaruh dalam konteks tertentu.

Apalagi, perkembangan media televisi saat ini sejalan dengan perkembangan sosial. Perkembangan sosial saat ini, pada dasarnya telah melampaui pemikiran modernitas (yang ditandai dengan munculnya industri barang dan jasa) menuju pemikiran pascamodernitas yang cenderung lebih diorganisasikan oleh seputar konsumsi budaya, permainan media massa, dan

⁸ Werner J. Saverin, & James W. Tankard, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

⁹ Y. Dedy Pradipto, *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional: Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

perkembangan teknologi informasi.¹⁰

Keberadaan media televisi di era pascamodernitas ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam menandai dinamika sosial dan ekonomi masyarakatnya, terutama dalam mengkonsumsi simbol-simbol dan gaya hidup dari pada fungsi produksi barang yang menjadi ciri khas era industri. Konsumsi simbol-simbol, gaya hidup, dan dinamika masyarakat terjadi, karena televisi sebagai media telah melakukan konstruksi realitas sosial.¹¹ Media penyiaran televisi saat ini justru telah membangun realitas sosial dari sebuah industri yang padat modal dan disajikan terhadap masyarakat yang dinamis dan kontemporer. Melalui media penyiaran televisi saat ini, berlangsung perbenturan yang mengguncang struktur kebudayaan dan sistem komunikasi yang telah mapan.

Bertolak dari argumentasi tersebut, maka informasi yang disajikan televisi—yang kemudian menghasilkan isi sajian media—lebih ditentukan oleh para pengelola yang menguasai media penyiaran tersebut. Apalagi, isi sajian media televisi saat ini akan selalu terus menerus berproses dan mengalami perubahan sejalan dengan kepentingan para pelaku yang terlibat di dalamnya. Sehingga yang perlu didiskusikan dalam hal ini, bukan semata-mata bagaimana isi sajian acara televisi mempengaruhi *audience*-nya, namun juga menyangkut praktek-praktek sosial sejumlah pelaku ketika mengakses dan menegosiasikan berbagai kepentingannya berkaitan dengan sajian acara televisi tersebut.

¹⁰ Philip Smith, *Cultural Theory: An Introduction* (Oxford & Massachusetts: Blackwell Publishers, 2001), hlm. 214—232.

¹¹ Peter Berger dan Thomas Luckman, *loc.cit.*

Diskusi tersebut dapat dilihat dari perbenturan dan tarik menarik antara aturan normatif dengan pragmatik serta antara pengetahuan dengan tindakan sosial.¹² Tarik menarik antara aturan normatif dan pragmatik akan bergerak dari satu situasi ke situasi lain secara terus menerus. Gerakan situasi tersebut akan bermakna jika ditafsirkan dan didefinisikan. Dan, proses penafsiran tersebut akan menjadi perantara antara kecenderungan bertindak dengan tindakan itu sendiri, jika kemudian di antara para pelaku yang terlibat, mendefinisikan tindakannya secara berbeda-beda dalam tindakan sosialnya karena perbedaan posisi mereka dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jika di antara para pelaku mampu mendefinisikan tindakannya dalam situasi yang sama, maka hal itu lebih disebabkan adanya persamaan penafsiran, bukan karena struktur organisasi tersebut mampu menentukan dan mengatur tindakan para pelaku.¹³

Sementara menurut Bourdieu (1977), tarik menarik antara pengetahuan dengan tindakan sosial merupakan kegiatan reflektif dan reproduktif. Ia merupakan habitus yang bekerja, baik antara relasi-relasi sosial yang objektif dan interpretasi-interpretasi subjektif, baik antara struktur kognitif (ide) dan realitas sosial (tindakan), maupun antara struktural maupun kultural. Sebab habitus, merupakan struktur subjektif—atau skema-skema interpretatif yang bekerja secara tersirat—yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada

¹² Agus Maladi Irianto, *Kebudayaan Populer: Dari Televisi Hingga Cara Orang Menyikat Gigi* (Semarang: Lengkongcilik Press, 2008).

¹³ Erving Goffman, *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience* (London: Harper & Row Publishers, 1994).

dalam ruang sosial.¹⁴

Berkaitan dengan tersajikannya tayangan acara televisi, habitus para pelaku yang terlibat dapat diidentifikasi dari skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual benda-benda dalam realitas sosial. Skema-skema itu berhubungan sedemikian rupa membentuk struktur kognitif yang memberi kerangka tindakan kepada setiap pelaku dalam rangka membangun relasi-relasi pada ranah sosial. Ranah bukan merupakan ikatan intersubjektif antarindividu, namun semacam hubungan yang tanpa disadari, atau posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Pada ranah inilah selalu berlangsung perjuangan posisi yang dipandang mampu mentransformasikan atau mempertahankan kekuatan. Ranah menjadi sarana kompetisi berbagai jenis modal (ekonomi, politik, dan simbol) yang digunakan dan disebarakan para pelaku untuk membangun relasi kekuasaannya.

Pengetahuan dan tindakan para pelaku melalui tayangan televisi tersebut telah melahirkan makna dalam kehidupan sosial. Dan, makna akan terlihat dari jenis-jenis hubungan sosial tertentu. Dengan demikian, pada dasarnya tindakan sosial terjadi dari interaksi-interaksi kongkret yang melibatkan setiap pelaku untuk merespons dan menafsirkan aturan-aturan (*rules*) yang ada secara aktif, kreatif, bahkan manipulatif. Tindakan sosial para pelaku, di satu sisi bisa menciptakan sistem sosial tetapi sisi lain juga melawan sistem sosial yang telah tercipta sebelumnya. Hal itu terjadi, karena sebagai subjek pelaku, manusia senantiasa berusaha untuk memanipulasi keteraturan normatif. Bahkan, manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya.

¹⁴ P Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

Dengan demikian media pada dasarnya bukan hanya sebatas untuk memenuhi rasa ingin tahu, tetapi juga digunakan sebagai landasan untuk bersikap, mengambil keputusan dan berperilaku. Para pelaku media telah menjadikan dirinya sebagai instrumen yang dapat mengkonstruksi suatu realitas. Media memberikan kontribusi cukup banyak dalam pengkajian terhadap pengetahuan dan gagasan.

Media saat ini justru telah membangun realitas sosial dari sebuah industri yang lebih menuntut pada pengembalian modal usaha yang disajikan terhadap masyarakat dinamis dan kontemporer. Dalam masyarakat kontemporer juga terdapat ritual kontemporer pula, dan media ditempatkan sebagai pemberi kontribusi terbanyak dalam menciptakan perubahan struktur tersebut. Media memfasilitasi diseminasi *the sacred* ala Durkheimian. Media seperti halnya bahasa, oleh antropologi kognitif ditempatkan sebagai alat atau sarana untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan dari satu individu ke individu lain.

Melalui media, berlangsung perbenturan yang mengguncang struktur kebudayaan dan sistem komunikasi yang telah mapan, berubah pada struktur kebudayaan dan sistem komunikasi baru. Dengan demikian, media memberi kontribusi terhadap proses perubahan dan pembentukan struktur pengetahuan yang baru. Melalui media, lahirlah kelompok yang berdaya (para pemodal) untuk membentuk *mainstream* atau nilai-nilai yang sekaligus membentuk struktur budaya dominan. Dengan demikian, kekuatan kelompok partikular dapat menghasilkan *cultural transgression* berkat mitos-mitos bentukan mereka dan diekspresikan melalui media yang mereka miliki. Dengan senjata media pula, para partikular tersebut mampu mengkooptasi *the*

sacred (ala Durkheimian). Sebagai contoh ketika terjadi gempa dan gelombang tsunami di Aceh dan Pulau Nias, Yogyakarta, atau sejumlah bencana yang lain, ternyata sebagian besar stasiun televisi dalam waktu bersamaan masih menayangkan acara hiburan dengan bersukaria.

Dari contoh tersebut memperkuat argumentasi bahwa telah terjadi perbenturan tentang *the sacred* yang terekspresi melalui media. Media telah mendistorsi makna *the sacred* dan menciptakan makna baru. *The sacred* menjadi *form* untuk *content* baru produksi media. Melalui media sistem komunikasi yang dianut kognitivistis dapat mengubah dan membentuk opini publik. Atau dengan kata lain, media dapat berperan membangun sentimen publik, dan akibat sentimen itu kelompok masyarakat bersatu membentuk struktur dalam menghadapi konflik dengan kelompok masyarakat lain.

Di sisi lain, setiap stasiun televisi dituntut memperhitungkan pengembalian setiap investasi yang ditanamnya. Sebagai sebuah industri, setiap stasiun televisi (swasta) dalam rangka mempertahankan eksistensinya tidak bisa menafikan kepentingan ekonomi. Determinasi ekonomi inilah, kemudian menjadi motivasi utama pengusaha siaran televisi untuk melakukan ekspansi usaha demi mengembalikan investasi yang mereka tanam. Pengembalian investasi yang paling nyata, ditandai dengan sejumlah tindakan pengelola stasiun merayu pemasang iklan agar menjadi sponsor sejumlah sajian acara yang ditayangkan, baik berupa hiburan maupun informasi.¹⁵ Diharapkan setiap siaran yang ditayangkan mampu “merayu” pemasang iklan. Untuk itulah, tuntutan pemasang iklan dijadikan prioritas utama setiap stasiun televisi dalam menyusun

¹⁵ John Fiske, *Television Culture*, (London: Routledge, 1987).

setiap isi siarannya. Artinya, sajian acara televisi dirancang bukan bertolak dari nilai kegunaan bagi *audience*, tetapi bagaimana *audience* terpengaruh dengan isi siaran yang diinginkan para pemasang iklan televisi.¹⁶

Dalam mengembangkan strategi dan kepentingannya, terbentuklah identitas-identitas yang kemudian diposisikan menjadi para pelaku media. Posisi para pelaku pada dasarnya telah ditentukan oleh suatu struktur atau bentuk pengorganisasian demi kepentingan media itu sendiri. Atau dengan kata lain, identitas-identitas yang telah diorganisasi dan dikonstruksi media pada dasarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang terus berkembang. Dalam mengembangkan kepentingannya, para pelaku akan melakukan tindakan saling mendukung, saling mengontrol, saling bersaing, dan saling mengalahkan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dipahami sebagai proses pembentukan pengetahuan.¹⁷

Berdasarkan sejumlah argumentasi tersebut, lalu apa relevansinya dengan diskusi tentang keberadaan media dengan isu multikulturalisme?

Filosofi Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.

¹⁶ Jean Baudrillard, *The Consumer Society* (London: Sage Publication, 1998); Agus Maladi Irianto, *Kebudayaan Populer: Dari Televisi Hingga Cara Orang Menyikat Gigi* (Semarang: Lengkongcilik Press, 2008).

¹⁷ Agus Maladi Irianto, *loc.cit.*

Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif (istilah 'monokultural' juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.¹⁸

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elite. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Belanda dan Denmark, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan monokulturalisme. Perubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya.

Akan tetapi, harus disadari bahwa akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan

¹⁸ Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>, diunduh 20 Juli 2009.

sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, serta prinsip-prinsip etika dan moral.

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat sampai dengan Perang Dunia ke-2, masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikategorikan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat, berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950-an. Puncaknya adalah pada tahun 1960-an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkannya perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action*. Kegiatan ini membantu mereka yang terpuruk dan minoritas, untuk dapat mengejar ketinggalannya dari golongan kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam beragam bidang pekerjaan dan usaha.¹⁹

Ditahun 1970-an, upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan

¹⁹ Parsudi Suparlan. 'Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika": Menuju Masyarakat Multikultural', Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3: Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

dalam perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan kulit putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dari corak kebudayaan orang kulit hitam, orang Indian, atau pribumi Amerika, dan berbagai kebudayaan bangsa dan sukubangsa yang tergolong minoritas sebagaimana dikemukakan oleh Nieto,²⁰ dan tulisan-tulisan yang disunting oleh Reed²¹. Yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pejabat pemerintah yang pro demokrasi dan HAM, dan yang anti rasisme dan diskriminasi ialah menyebarluaskan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970-an. Bahkan, dewasa ini anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan sukubangsa lainnya dapat belajar di sekolah dengan menggunakan bahasa ibunya sampai tahap-tahap tertentu.²² Gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970-an.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.²³ Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik ter-

²⁰ S. Nieto, *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (New York: Longman, 1992).

²¹ I. Reed. (peny.), *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace* (Pinguin, 1996).

²² S. Nieto, *loc.cit.*

²³ B. Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach* (Oxford: Blackwell, 1996).

cakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut.²⁴

Paradigma multikultural yang ramai didengungkan sebagai langkah alternatif dalam rangka mengelola masyarakat multikultur Indonesia tampaknya masih menjadi wacana belaka. Beberapa kasus telah membuktikan betapa lemahnya nalar multikultural dalam benak bangsa ini. Mari kita tilik kembali latar sosiologis antropologis bangsa ini. Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal berbagai kelompok masyarakat yang kini dikategorikan sebagai "Bangsa Indonesia" dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun ke dalam golongan penganut ajaran agama yang berbeda satu dengan lainnya. Sedang, secara vertikal berbagai kelompok masyarakat itu dapat dibeda-bedakan atas dasar *mode of production* yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya.

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. Dalam masyarakat majemuk dengan demikian ada perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas. Menurut Suparlan, kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya

²⁴ I. Reed, *loc.cit.*

dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat dalam masyarakat di mana mereka itu hidup. Mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif, dan mereka menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan, dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.²⁵

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing; (3) adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajatnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut.

Keberadaan dan kehidupan minoritas yang dilihat dalam pertentangannya dengan dominan, adalah sebuah pendekatan untuk melihat minoritas dengan segala keterbatasannya dan

²⁵ Parsudi Suparlan, *loc.cit.*

dengan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari mereka yang tergolong dominan. Dalam perspektif ini, dominan-minoritas dilihat sebagai hubungan kekuatan. Kekuatan yang terwujud dalam struktur hubungan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Bila kita melihat minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dengan mayoritas maka yang akan dihasilkan adalah hubungan mereka yang populasinya besar (mayoritas) dan yang populasinya kecil (minoritas). Perspektif ini tidak akan dapat memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya.

Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan sosial askriptif adalah suku bangsa (termasuk golongan ras, kebudayaan sukubangsa, dan keyakinan beragama), gender, jenis kelamin, dan umur. Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk mengubah cara hidup dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas (atau asimilasi) adalah pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk.

Berbagai kritik atau penentangan terhadap dua pola yang umum dilakukan oleh golongan dominan terhadap minoritas biasanya tidak mempan, karena golongan dominan mempunyai kekuatan berlebih menggunakan ketentuan hukum dan berbagai cara lain yang secara sosial dan budaya masuk akal bagi kepentingan mereka yang dominan. Bahkan, ketika politik sentralisme kekuasaan Orde Baru kemudian harus berubah dengan era otonomi daerah pun, ternyata tetap

saja menghasilkan golongan dominan dan golongan minoritas yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kesukubangsaan yang bersangkutan. Sebab, berbarengan dalam proses otonomisasi dan desentralisasi pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala "provinsialisme" yang hampir tumpang tindih dengan "etnisitas".

Faktor lain, yang turut menyebabkan kurang berkembangnya pemikiran multikultural pada tingkat praksis disebabkan masih dominannya wacana "toleransi" dalam menyikapi realitas multikultural tersebut. Penghargaan atas yang lain sebagaimana dibayangkan dalam "toleransi" memang dibutuhkan. Namun, toleransi seringkali terjebak pada ego-sentrisme. Ego-sentrisme di sini adalah sikap "saya mentoleransi yang lain demi saya sendiri". Artinya, setiap perbedaan mengakui perbedaan lain demi menguatkan dan mengawetkan perbedaannya sendiri ("*I am what I am not*"). Yang terjadi kemudian adalah koeksistensi bukannya proeksistensi yang menuntut kreativitas dari tiap individu yang berbeda untuk merajut tali-temali kebersamaan. Tak aneh kalau kemudian yang muncul bukannya situasi rukun malah situasi acuh tak acuh (*indifference*).

Untuk itu, perlu kiranya mengubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*), dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan

saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komunitas atau masyarakat setempat.

Upaya penyebarluasan dan pemantapan serta penerapan ideologi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini, mau tidak mau harus bergandengan tangan dengan upaya penyebaran dan pemantapan ideologi demokrasi dan kebangsaan atau kewarganegaraan dalam porsi yang seimbang. Sehingga setiap orang Indonesia nantinya, akan mempunyai kesadaran tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga sukubangsa dan kebudayaannya, tergolong sebagai gender tertentu, dan tergolong sebagai umur tertentu yang tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang atau kelompok yang tergolong lain dari dirinya sendiri dan akan mampu untuk secara logika menolak diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang oleh kelompok atau masyarakat yang dominan.

Perjuangan anti diskriminasi dan perjuangan hak-hak hidup dalam kesederajatan dari minoritas adalah perjuangan politik, dan perjuangan politik adalah perjuangan kekuatan. Perjuangan kekuatan yang akan memberikan kekuatan kepada kelompok minoritas sehingga hak-hak hidup untuk berbeda dapat dipertahankan dan tidak didiskriminasi karena digolongkan sebagai sederajat dari mereka yang semula menganggap sebagai dominan. Perjuangan politik seperti ini menuntut adanya landasan logika di samping kekuatan nyata yang harus digunakan dalam penerapannya. Logika yang masuk akal tersebut ada dalam multikulturalisme dan dalam demokrasi.

Dari sinilah kita perlu untuk meneguhkan kembali paradigma multikultural tersebut. Peneguhan ini harus lebih ditekankan

kepada persoalan kompetensi kebudayaan sehingga tidak hanya berkuat pada aspek kognitif melainkan beranjak kepada aspek psikomotorik. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, dan berkesinambungan. Mengingat pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkannya. Kita perlu menyebarkan pemahaman dan mendidik masyarakat akan pentingnya multikulturalisme bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kita memerlukan pendidikan multikulturalisme yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan multikulturalisme meniscayakan adanya dialog kebudayaan sehingga di antara keragaman kebudayaan yang ada tidak akan terjadi benturan, apalagi menjadi sumber konflik. Tibi (1996) menyatakan bahwa dialog kebudayaan merupakan cara terbaik dalam membuat saling pengertian guna menegakkan perdamaian di dunia.

Pendidikan multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas memerlukan pengenalan terhadap beragam kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia dari beragam suku bangsa, ras atau etnis, dan agama. Pendidikan multikultural, menurut Khoirul Mustaqa menyangkut empat hal. *Pertama*, pendidikan multikultural menolak pandangan yang menyamakan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan juga bermaksud membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggungjawab primer dalam mengembangkan kompetensi kebudayaan semata-mata berada di tangan mereka melainkan tanggungjawab semua pihak. *Kedua*, pendidikan

ini juga menolak pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Hal ini dikarenakan seringnya para pendidik, secara tradisional, mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok sosial yang relatif *self sufficient*. Oleh karena individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi di mana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural akan melenyapkan kecenderungan memandang individu secara stereotip menurut identitas etnik mereka. *Ketiga*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasinya. Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang disandang individu dan identitas sosial primer dalam kelompok etnik tertentu. *Keempat*, kemungkinan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran mengenai kompetensi dalam beberapa kebudayaan akan menjauhkan kita dari konsep dwi-budaya (*bicultural*) atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Sebab, dikotomi semacam ini bersifat membatasi kebebasan individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan.²⁶

Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan,

²⁶<http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm>, diunduh 20 Juli 2009.

yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Media Sebagai Penebar Selera Keseragaman

Seperti telah kita diskusikan pada pembahasan terdahulu, media (terutama tayangan televisi) kini nyaris telah memprovokasi pemirsanya. Sebuah interaksi antarpemirsa televisi tiba-tiba tercipta dengan cepat, secepat mereka merepresentasikan dirinya akibat merespons sejumlah tayangan acara yang ada. Ia telah membentuk gerakan arus besar tentang relasi-relasi antara yang mendominasi dan yang terdominasi, antara yang mempengaruhi dan yang terpengaruhi, antara yang memprovokasi dan yang terprovokasi, antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, bahkan antara gambaran ruang yang bersifat publik dengan yang bersifat domestik.

Acara tayangan televisi telah menjadi bagian dari refleksi kehidupan sehari-hari. Ia menjadi model dari sebuah habitus yang berperan aktif dalam ranah sosial. Ia telah menjadi fenomena komunikasi yang tidak bisa dilepaskan dari karakteristik individu-individu yang kemudian menjadi objek dan subjeknya. Bahkan, tanpa sadar ia telah membangun hubungan-hubungan sosial melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi, dan kultural. Ruang dan waktu tak lagi menjadi pembatas dan kendala terjadinya perubahan. Teknologi komunikasi itu seolah menelusup dari ruang publik ke setiap individu hingga ruang-ruang privasi. Kita didorong untuk masuk dalam lorong waktu dan peristiwa yang nyaris tak terbatas, sejalan juga dengan

tanda-tanda yang makin rumit dan tak terbatas.

Kita yang tinggal di berbagai pelosok Nusantara, dalam waktu bersamaan—meski dengan pembagian waktu wilayah yang berbeda—dapat mengikuti informasi yang sama dengan orang lain di seluruh pelosok negeri dari sebuah tayangan televisi. Orang yang tinggal di Semarang dalam waktu yang bersamaan menyaksikan berita meledaknya Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton dengan orang Manado, Sulawesi Utara. Dalam waktu yang lain, orang di Medan secara bersamaan tampak tak jenak mengikuti hasil *quickcount* pemilihan Presiden dengan orang Jayapura di Papua. Bahkan orang di Jakarta dalam waktu bersamaan ikut meneteskan air mata dengan orang Padang, Sumatra Barat, karena terharu melihat tokoh idolanya diperlakukan semena-mena oleh tokoh lain dalam sebuah tayangan sinetron.

Pesawat televisi telah menjadi “totem” yang selalu ada di mana-mana. Di rumah-rumah reot tanpa WC dan kamar mandi, di kios-kios rokok, warung-warung kopi, hingga di sejumlah perumahan, pesawat televisi merupakan “berhala” yang selalu menghiasi ruang-ruang tersebut. Dari sinilah lahir kebudayaan massa yang cepat dan penuh perubahan. Di tengah kebudayaan massa yang serba cepat itulah sejumlah ekspresi tentang nilai, pengetahuan, norma, dan simbol, menandai dinamika masyarakat kita. Televisi, kini tak lagi sekadar media komunikasi yang melahirkan dan membangun hubungan sosial secara harmonis. Ia bisa jadi justru mendorong penghancuran hubungan sosial tersebut. Apalagi media—semacam televisi—merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan strategi yang kemudian melahirkan propaganda kekuatan politik,

ekonomi, bahkan misi keagamaan.²⁷

Di samping itu, jika televisi kita tempatkan sebagai media strategi komunikasi, maka ia mempunyai tujuan memelihara atau mengubah sikap atau pendapat sasaran demi kepentingan sumber pembuat strategi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa media komunikasi lebih cenderung bertujuan untuk melahirkan khalayak (*audience*) agar patuh kepada pihak yang menguasai modal komunikasi, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Atau sebaliknya, ia justru menjadi alat pembangkang terhadap sistem yang sudah mapan, tetapi diharapkan berubah patuh terhadap sistem yang lain. Media komunikasi juga mempunyai dimensi sebagai pembebasan yang mampu menumbuhkan ruang otonomi dan independensi khalayak dalam menghayati makna suatu wacana. Artinya, televisi sebagai media komunikasi mempunyai nilai pragmatis dalam kehidupan sehari-hari, baik dari tingkat institusi maupun individu-individu. Ia kemudian merupakan kontestasi wacana terus menerus membawa khalayak kepada nilai-nilai yang harus dimenangkan.

Melalui tayangan televisi, seolah kita merasa kehilangan identitas. Di satu sisi identitas akan terbentuk berdasarkan kemauan kita sendiri, sedangkan di sisi lain identitas akan sangat tergantung dari kekuatan-kekuatan objektif yang terjadi di sekitar kita yang mengharuskan kita untuk meresponsnya. Dan, respons tersebut secara tidak langsung juga memberi bentuk lain terhadap apa yang kita anggap sebagai diri kita.

Ketika arus informasi dibuka dengan lebar, maka televisi pun telah membentuk kebudayaan massa yang serba cepat. Meski ia mencerminkan roda kehidupan sehari-hari, namun kebudayaan

²⁷ David Berlo, *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice* (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1960).

massa yang dikelola dalam teknokapitalis tanpa etika itu melahirkan, perilaku konsumtif dan penuh kekerasan. Tanpa disadari pula, televisi yang merupakan bagian dari kebudayaan massa itu telah mematikan kebudayaan alternatif dan klasik. Teknokapitalis televisi dikonstruksi untuk memanfaatkan tiap detik waktu senggang dan produktif kehidupan masyarakat sehari-hari, maka televisi memberi bias besar kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa.²⁸

Melalui tayangan televisilah, telah terbangun rasa empati yang membabi-butakan tersebut. Kotak berlayar kaca itu, dalam setiap detiknya justru membangun kontestasi kekuasaan. Bahkan, kontestasi kekuasaan itu tercipta, tidak hanya berupa sejumlah program acara yang ditayangkan, namun bisa saja respons khalayak terhadap program acara tersebut. Dengan demikian televisi telah membentuk pemahaman struktur sosial yang memiliki kekuatan memaksa dan bahkan mengarahkan tindakan sosial setiap khalayak untuk menanggapi dan menilai keberadaannya.

Tanpa sadar terbangun argumentasi bahwa acara televisi pada dasarnya telah mereduksi relasi-relasi kekuasaan menjadi relasi-relasi komunikasi. Fungsi “politis” televisi seolah terpenuhi dengan sistem simbolik yang merupakan upaya sistematis untuk melegitimasi dominasinya berupa “definisi dunia sosial” yang menjadi program penayangan suatu acara. Proses terciptanya sistem simbolik untuk memaksakan suatu pandangan tentang “definisi dunia sosial” secara tanpa sadar dan spontan telah mengkonstruksi “konflik simbolik” kehidupan sehari-hari masing-masing *audience*. Misalnya, penampilan dan gaya bahasa, model

²⁸ Garin Nugroho (2004) “Televisi Musuh di Ruang Keluarga”, *Kompas*, Rabu, 9 Juni 2004.

pakaian, potongan rambut, selera makanan, serta habitus-habitus keseharian lain dari masing-masing agen yang menjadi *audience* akan lebih merujuk pada nilai-nilai yang disajikan televisi.

Dari sinilah televisi telah membentuk kebudayaan baru tentang pengetahuan, simbol, bahkan model-model interaksi antarindividu di belahan bumi ini. Perbedaan etnik, status sosial, pendidikan, agama, bahkan jenis-jenis pekerjaan – yang selama ini memberi andil terbangunnya gambaran pluralisme— kini menjadi buram dengan munculnya sajian acara televisi. Munculnya sejumlah tindakan sosial masing-masing *audience* atas persepsi tentang “definisi dunia sosial” yang ditawarkan televisi tersebut pada merupakan sisi objektif munculnya struktur sosial baru yang tidak bisa kita elakkan.

Hasil penelitian Sparks (2003) misalnya, menyebutkan bahwa materi tayangan televisi lebih cenderung menghasilkan dampak negatif, mempromosikan cara berfikir, berperilaku, dan tindakan kekerasan *audience*-nya. Selain itu penggambaran kekerasan yang terus menerus dari televisi justru mengurangi rasa sensitif kita kepada kekerasan itu sendiri, karena membuat kita melakukan pemakluman-pemakluman. Dan, ketika orang tidak lagi sensitif terhadap kekerasan maka perilaku kekerasan akan lebih memungkinkan untuk kembali berkembang.²⁹ Dampak tayangan kekerasan media televisi tersebut pada dasarnya juga memberi pengaruh penontonnya dalam mengonsumsi tayangan televisi, dan sekaligus mengkonstruksi realitas subjektif kita. Hal itu terjadi, karena pada saat yang bersamaan, penonton berada dalam situasi dunia yang penuh dengan makna simbolik

²⁹ Collin Sparks, *Comunism, Capitalism and the Mass Media* (London: Sage Publication, 1987).

dan tidak bisa menghindari terpaan berbagai pola pengulangan tayangan televisi yang telah mengepung kehidupannya.

Melihat nilai strategisnya media televisi semacam itu, maka idealnya seperti yang dianjurkan Glasser (1984), televisi bisa merefleksikan struktur realitas sosial, menawarkan kesempatan dan akses yang sama kepada kelompok minoritas, memposisikan sebagai forum kepentingan masyarakat atau komunitas yang berbeda-beda, atau bahkan menjadi wahana untuk mengembangkan idiologi multikulturalisme bagi *audience*-nya.

Jika melihat gambaran tersebut, maka meminjam argumentasi Bourdieu (1977) tindakan sosial setiap *audience* televisi dapat dilihat dari pemahaman praktek-praktek sebagai kegiatan refleksif dan reproduktif. Ia merupakan habitus yang bekerja baik antara relasi-relasi sosial yang objektif maupun interpretasi-interpretasi subjektif.³⁰ *Audience* televisi menggunakan habitus dalam merespons realitas sosial, yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial.

Dengan kata lain, habitus *audience* televisi diidentifikasi oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realitas sosial. Skema-skema itu berhubungan sedemikian rupa membentuk struktur kognitif yang memberi kerangka tindakan kepada setiap individu dalam kesehariannya bersama orang lain. Misalnya, ibu rumah tangga agar tidak dianggap ketinggalan zaman maka harus mengikuti tayangan *infotainment*, ayah harus mengikuti acara sepak bola, anak remaja harus mengikuti tayangan kontes bintang

³⁰ P Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

idola, bahkan kanak-kanak pun harus tak ketinggalan terhadap tayangan film kartun. Keharusan-keharusan semacam itu, secara spontan nyaris menghinggapi setiap individu dalam melakukan relasi-relasi di ranah sosial.

Tayangan televisi disadari atau tidak telah menawarkan keseragaman selera bahkan menciptakan “standarisasi” identitas. Konstruksi realitas yang diciptakan media tersebut, di satu sisi bisa menciptakan solidaritas antar identitas yang melekat pada setiap *audience*-nya. Namun di sisi lain ia justru membentuk standarisasi dan keseragaman baru tentang identitas itu sendiri, yang dalam hal ini justru berseberangan dengan idiologi multikulturalisme.

Idealnya media memberi pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman kebudayaan. Seperti telah disinggung pada pembahasan terdahulu, konsep multikultural merupakan konsep yang mengakui dan melindungi keragaman budaya serta menyetarakan derajat dari kebudayaan dan identitas yang berbeda-beda. Semangat multikultural yang berusaha untuk mengakui dan melindungi keragaman budaya pada dasarnya telah memberi kebebasan pada setiap budaya untuk bertahan dan berkembang. Semua budaya yang ada harus diberi kebebasan yang sama.

Pemberangusan informasi di era Orde Baru yang kemudian berubah menjadi deteminasi ekonomi sehingga membentuk persaingan dalam tayangan televisi, idealnya memberi peluang munculnya alternatif kebebasan ekspresi bagi *audience*-nya. Kesetaraan budaya menghasilkan sebuah identitas dan integrasi nasional di negeri yang konon sedang bersemangat menjalankan multikulturalisme yang memang masih gamang. Semangat multikultural seolah-olah justru lebih mengarah pada

primordialisme dan standarisasi baru, yang justru berasal dari keberadaan media. Maka jangan heran jika seorang pakar ilmu politik yang tampil di layar televisi terpaksa harus menjadi “orang lain” dan menafikan integritasnya ketika dia harus menjadi tim sukses sebuah partai politik.

Keberaan media bisa jadi memang menjadi perekat sejumlah identitas (kepentingan) yang terpecah. Dan, hal itu sejalan dengan isu multikulturalisme yang dipandang dapat menjadi perekat baru integrasi bangsa. Namun harus diakui bahwa integrasi nasional yang selama ini dibangun berdasarkan politik kebudayaan seragam dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi dan semangat demokrasi global.

Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia. Hampir semua negara di dunia tersusun dari keanekaragaman kebudayaan—artinya perbedaan menjadi dasarnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif. Multikulturalisme, idealnya diterjemahkan dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.³¹

Daftar Pustaka

Batarns, K

1991 *Etika*. Jakarta: Gramedia.

Barker, Chris

1999 *Television, Globalization and Cultural Identities*.
Buckingham, Philadelphia: Open University Press).

³¹ Lihat Saifuddin, <http://bunga01.blogspot.com/2008/11/html>), diunduh 20 Juli 2009.

Baudrillard, Jean

1998 *The Consumer Society*. London: Sage Publication.

Bennet, Tonny

1982 "Media, Reality Signification", Michel Gurevitch (ed), *Culture, Society and the Media*. Metheun.

Berlo, David

1960 *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Bourdieu, P

1977 *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Berger, Peter dan Thomas Luckman

1990 *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.

Carey, James W.

1989 *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. London: Unwin Hyman Ltd.

Fay, B.

1996 *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.

Fairclough, Norman

1994 *Critical Discourse Analysis*. New York: Longman Group Limited.

Fiske, John

1987 *Television Culture*. London: Routledge.

Glazer, N.

1996 *We Are All Multiculturalists Now*. Cambridge: Harvard University Press.

Goffman, Erving

1994 *Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience*. London: Harper & Row Publishers.

Hall, Stuart

- 1978 "The Centrality of Culture: Notes on the Cultural Revolutions of Our Times", K. Thompson (ed.), *Media and Cultural Regulations*. London: Sage.

Guba, E.G. (peny.)

- 1990 *The Paradigm Dialog*. London: Sage.

Irianto, Agus Maladi

- 2008 *Kebudayaan Populer: Dari Televisi Hingga Cara Orang Menyikat Gigi*. Semarang: Lengkongcilik Press.

Jary, D. dan J. Jary

- 1990 'Multiculturalism', *Dictionary of Sociology*. New York: Harper.

Littlejohn, Stephen W.

- 1994 *Theories of Human Communication*. Belmont: Communication. Wadworth Publishing Company.

McQuail, Dennis

- 2000 *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.

Nieto, S.

- 1992 *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman.

Nugroho, Garin

- 2004 "Televisi Musuh di Ruang Keluarga", *Kompas*, Rabu, 9 Juni.

Parekh, Bikhu

- 2001 *Rethinking Multiculturalism*. Cambridge: Harvard University Press.

Piliang, Yasraf Amir

- 2004 *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Bandung: Jalasutra.

Reed, I. (peny.)

- 1996 *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin.
- Rex, J.
- 1985 'The Concept of Multicultural Society', Occasional Paper in Ethnic Relations No. 3. Centre for Research in Ethnic Relations (CRER)
- Saverin, Werner J. & James W. Tankard
- 2005 *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Smith, Philip
- 2001 *Cultural Theory: An Introduction*. Oxford & Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Sparks, Collin
- 1987 *Comunism, Capitalism and the Mass Media*. London: Sage Publication.
- Suparlan, P.
- 2001 'Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika": Menuju Masyarakat Multikultural', Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3: Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002
- Tibi, Bassman
- 1996 *Moralitas Internasional Sebagai suatu Landasan Lintas Budaya*, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>
<http://bunga01.blogspot.com/2008/11/html>
<http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm>.

DIALOG DAN TOLERANSI: MULTIKULTURALISME DI KOTA YOGYAKARTA (CATATAN PENGALAMAN)

M. Nursam

Pengantar

Secara konseptual, tidak mudah membuat definisi tunggal mengenai multikulturalisme. Secara sederhana multikulturalisme berarti “keberagaman budaya”.¹ Dalam wacana intelektual ada tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari keberagaman tersebut--baik keberagaman agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda--yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Meski mengacu kepada adanya ketidaktunggalan, ketiga kata di atas itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama. Konsep pluralitas mengandaikan adanya ‘hal-hal yang lebih dari satu’ (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang ‘lebih dari satu’ itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Dibandingkan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Secara konseptual

¹ Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002: 2-6) dikutip dari Agus Moh. Najib, Ahmad Baidowi, Zainudin “Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam (Studi terhadap UIN Yogyakarta, IAIN Banjarmasin, dan STAIN Surakarta)”.

terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*)² terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya.³

Sebagai wacana intelektual, multikulturalisme merupakan

² *Politics of recognition* dikemukakan oleh Charles Taylor pada 1992 di depan kuliah terbuka di Princeton University. Mulanya gagasannya adalah gagasan politik yang kemudian berkembang di kajian lain, filsafat, sosiologi, budaya dan lainnya. Gagasannya dipengaruhi oleh pandangan Jean-Jacques Rousseau dalam *Discourse Inequality* dan kesamaan martabat (*equal dignity of human rights*) yang dicetuskan Immanuel Kant. Gagasan Taylor bersumber pada pertama, bahwa sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama. Kedua, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan hal yang ketiga, yaitu pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua elemen sosial-budaya, termasuk juga negara. Charles Taylor, "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman, *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), hlm. 18.

³ *Ibid.*

suatu perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial yang mulai berkembang di Amerika, Kanada, Inggris dan Australia. Pesatnya perkembangan pemikiran multikulturalisme—menurut Tilaar—didorong oleh sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu HAM, globalisme dan proses demokratisasi.⁴

Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai multikulturalisme sangat marak paling tidak selama hampir satu dasawarsa terakhir ini. Multikulturalisme digembor-gemborkan, dipuja-puja, dipidatokan oleh para elite di seluruh strata kehidupan, media massa, dan lain sebagainya. Oleh karena multikulturalisme terlalu sering digembor-gemborkan, oleh seorang pengamat, kata ini telah dianggap semacam “*buzzword*”, sebuah kata yang bunyinya mentereng tetapi tak lagi punya makna.⁵

Sebagai konsep modern, bangsa dan Negara Indonesia adalah sesuatu yang baru; gejala abad ke-20. Jika Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dijadikan dasar bagi lahirnya Bangsa Indonesia, maka itu berarti usianya baru hampir 81 tahun. Negara Indonesia, lebih muda lagi; baru berusia hampir 64 tahun sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Jauh sebelum bangsa dan Negara Indonesia lahir, di Nusantara terdapat berbagai macam kelompok masyarakat dengan beragam etnik, ras, agama, adat-

⁴ H. A. R. Tilaar, “Pendidikan Dalam Multikulturalisme”, Ki Supriyoko (editor), *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm. 5—7.

⁵ Manneke Budiman, “Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural”, Ki Supriyoko (editor), *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm. 213.

istiadat, budaya dan sebagainya. Kenyataan sosial-budaya yang ada di Nusantara pada akhirnya menjelma menjadi bangsa dan negara: Indonesia! Kenyataan ini termanifestasikan dalam lambang negara kita: Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah kemajemukan sebagai fakta sosial-budaya yang melekat dalam tubuh Indonesia secara otomatis menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara multikultural? Jika pernyataan ini diterima, maka kita membenarkan klaim yang mengatakan bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan. Benarkah klaim ini? Apakah multikulturalisme sejenis harta benda yang bisa diwariskan?

Menurut Manneke Budiman, multikulturalisme seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sekumpulan perbedaan belaka yang dapat dijumlahkan dan disatukan secara kuantitatif. Multikulturalisme adalah sebuah kualitas, dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Multikulturalisme secara mutlak mensyaratkan adanya empati, solidaritas dan keadilan sosial. Tidak cukup bagi kita untuk hanya hidup berdampingan secara damai dengan tetangga. Dibutuhkan adanya empati, atau kemampuan dan kesediaan menjadi diri kita sendiri dan sekaligus pada saat yang sama menempatkan diri kita pada posisi tetangga kita berada. Tanpa adanya semangat kebersamaan dalam perbedaan, empati tidak mungkin dapat terwujud. Ini merupakan pondasi bagi terbangunnya solidaritas sosial bukan saja antara anggota kelompok tapi lintas kelompok. Apabila empati adalah sesuatu yang tidak kasat mata tetapi dapat dengan jelas dirasakan, solidaritas adalah sesuatu yang dapat diperlihatkan dalam bentuk perilaku. Dalam konteks solidaritas lintas kelompok, ada suatu kesadaran yang kental bahwa perjuangan kepentingan sebuah kelompok hanya dapat bernilai

positif dan dipandang berhasil apabila perjuangan tersebut mampu mensejahterakan kelompok lain. Solidaritas menjadi jelas terlihat ketika upaya memperjuangkan kepentingan kelompok serta keberhasilan dari upaya tersebut tidak dicapai dengan cara meminggirkan atau mengorbankan kepentingan kelompok lain dalam satu atap. Dengan kata lain, setiap perjuangan kepentingan suatu kelompok harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan sosial. Perjuangan kelompok yang berkeadilan sosial tidak akan mencari keutamaan untuk diri sendiri, meskipun perjuangan tersebut harus menjamin terciptanya keadilan sosial untuk kelompok sendiri. Negara, dalam hal ini, punya kewenangan untuk memfasilitasi dan menjamin keadilan sosial, sementara—dalam hal empati dan solidaritas—kesadarannya harus tumbuh dari tataran akar rumput lewat pengalaman.⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa multikulturalisme bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, warisan, tetapi sesuatu yang harus diusahakan dan diperjuangkan secara terus-menerus, termasuk di Indonesia. Perjuangan untuk mewujudkan multikulturalisme hanya dapat dicapai dari dua aras; masyarakat dan pemerintah.

Kota Yogyakarta

Sejak didirikan pada 1756, Kota Yogyakarta terus mengalami perkembangan. Kota ini telah menjadi tempat berbagai golongan masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Jauh sebelum berdirinya, wilayah ini sudah mengalami

⁶ Manneke Budiman, "Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural" Ki Supriyoko (editor), *Ibid.*, hlm. 213.

⁷ Untuk mengetahui secara lebih detail sejarah Kota Yogyakarta, khususnya kehidupan sosial di dalamnya, lihat Abdurrahman Surjomihardjo,

perjumpaan dengan agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen; juga dengan budaya-budaya dari luar seperti India, Cina, Arab, Eropa, kemudian disusul dengan budaya-budaya dari berbagai daerah di Nusantara.

Pluralitas masyarakat Kota Yogyakarta semakin berkembang sejak revolusi nasional 1945—1950. Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946 membuka pintu bagi hadirnya beragam orang di kota ini. Selama berlangsungnya revolusi nasional, ada dua masyarakat yang hidup di Kota Yogyakarta. *Pertama*, masyarakat asli Yogyakarta dengan sikapnya yang tradisional. *Kedua*, masyarakat pendatang yang membawa semangat revolusi. Pembauran antara masyarakat pendatang asli segera terjadi.⁸

Pada akhir revolusi nasional, hampir bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, di Yogyakarta didirikan Universitas Gadjah Mada (UGM), pada 19 Desember 1949. Pendirian universitas negeri pertama oleh Pemerintah Indonesia ini semakin membuka hadirnya anak-anak bangsa dari berbagai daerah dari seluruh Tanah Air menuntut pendidikan di Kota Yogyakarta. Mulai sejak itu sampai sekarang, masyarakat Kota Yogyakarta semakin beragam baik dari segi etnik, ras, agama, daerah dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya kemudian, Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, budaya, pariwisata, dan lain

Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008). Meskipun dalam buku ini mengulas periode kolonial, tetapi beberapa aspek sosial Kota Yogyakarta masih relevan sampai sekarang. Untuk perubahan sosial yang terjadi di Yogyakarta secara lebih luas, lihat Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009).

⁸ Selo Soemardjan, *ibid.*, hlm. xi.

sebagainya. Yang menarik dari perubahan Kota Yogyakarta--menurut sejarawan Djoko Suryo--adalah kecenderungan perubahan dari Kota Tradisional menjadi Kota Nasional atau Kota Indonesia, menuju perkembangan ke arah Kota Internasional.⁹

Yogyakarta, Kosmos Budaya, Pengalaman

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Artinya, di kota ini ditemukan sejumlah fasilitas pendidikan yang dapat dikatakan melebihi fasilitas yang tersedia di banyak daerah di Indonesia. Dalam konteks seperti inilah, saya mengenal Yogyakarta dari jauh, di salah satu kampung udik, Tolo, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Atas kesempatan yang diberikan oleh universiteit revolusi, UGM, saya mendaftar dan akhirnya diterima. Maka sejak 1992, saya menginjak kaki di Yogyakarta.

Sejak saat itulah saya mulai memasuki dunia baru; Yogyakarta dengan segala aspek dan dimensinya. Yogyakarta sebagai sebuah kosmos, sebuah ruang budaya yang sebagian besar penghuninya beretnis Jawa, sebagai hasil sempalan Kerajaan Mataram yang hingga sekarang masih hidup, dipelihara, dan dihormati, Yogyakarta dapat disebut sebagai ruang kehidupan yang sangat didominasi oleh aura budaya Jawa, terutama Jawa Tengah Pedalaman.

Sebagai orang yang dilahirkan di tengah etnis Makassar, sudah pasti saya dibentuk dari pandangan dan nilai-nilai budaya Makassar. Persepsi, sikap dan tindakan saya dipengaruhi oleh

⁹ Djoko Suryo, "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990", Freek Colombijn, dkk. (editor), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak bekerjasama dengan NIOD dan Jurusan Sejarah UNAIR, 2005), hlm. 43.

nilai budaya Makassar; termasuk di dalamnya mengenai stereotip etnis¹⁰ terhadap etnis lain di Indonesia. “Bekal” kultural inilah yang menjadi “acuan” dalam berinteraksi sosial di Yogyakarta pada masa awal di kota ini.

Dalam proses interaksi di Yogyakarta, mau tidak mau saya terjaring dalam kosmologi budaya Jawa (Yogya) yang berpusat pada gagasan mengenai halus dan kasar, *alus-kasar*. *Alus* berarti murni, berbudi halus, halus tingkah lakunya, sopan, indah sekali, lembut, halus, beradab, ramah. *Kasar*, hanyalah kebalikan dari itu: tidak sopan, kasar, tak beradab. Sebagai *wong sabrang*, saya dianggap bersuara keras dan berbahasa “tidak beraturan”. Di dalam kosa-kata lakon wayang kulit, mereka yang berasal dari kerajaan *sabrang* ditampilkan dalam wujud raksasa, makhluk yang berbeda dari yang dikenal oleh orang Jawa dan yang mempunyai bahasa, tingkah laku, yang berbeda dari mereka yang dianggap tergolong dalam lingkungan yang dikenal oleh masyarakat tersebut.¹¹

Sebagai miniatur Indonesia, di Yogyakarta saya bergaul dengan banyak etnis di Indonesia, termasuk dengan orang-orang asing. Dari pergaulan tersebut, terjadi interaksi dari kedua belah pihak yang pada akhirnya meningkatkan saling pengertian. Bagi bangsa Indonesia

¹⁰ Stereotip etnis adalah salah satu bentuk persepsi yang sangat penting. Stereotip etnis bisa mempunyai landasan faktual, bisa juga tidak. Namun, bisa dipastikan bahwa persepsi masing-masing golongan tersebut satu sama lain akan menentukan relasi fungsional antarmereka. Selengkapnya lihat Suwar-sih Warnaen, *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).

¹¹ Lihat Faruk, dkk. (Tim Peneliti), *Pengalaman, Kesaksian, dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta: Hasil Penelitian tentang “Hubungan Antaretnis dan Iman di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta* (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei bekerjasama dengan LP3ES, 1999), hlm. 183.

yang multietnis, saling pengertian yang baik antargolongan etnis akan sangat membantu dalam usaha membangun persatuan bangsa yang utuh dan dinamis. Telah menjadi fakta sosial bahwa timbulnya konflik antaretnis antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan tersebut bisa diatasi dengan kontak dan interaksi sosial. Dari interaksi yang seimbang tersebut akan melahirkan saling pengertian.

Pergaulan dengan banyak kalangan dengan berbagai latar di Yogyakarta telah melahirkan pemahaman baru atas pemahaman sebelumnya. Dalam konteks keindonesiaan, pemahaman tersebut telah memungkinkan saya untuk menghayati keindonesiaan secara lebih substansial. Pergaulan di kampus UGM khususnya dan Kota Yogyakarta secara tidak langsung membawa angin segar bagi terwujudnya semangat kebangsaan. Mahasiswa non-Jawa, termasuk saya, semakin mendapatkan akses untuk memasuki wacana pergaulan yang membangun semangat kebangsaan.

Semangat ini tentu saja mendapat pengaruh dan dukungan dari aspek lain dalam kebudayaan Jawa, yaitu kebersamaan dan harmoni yang dibalut dalam budaya *teposeliro*. *Teposeliro* mengandung makna bahwa di atas semua kepentingan individu masih ada kepentingan orang lain dan di atas itu lagi masih ada kepentingan bersama yang harus dihormati. Kepentingan orang lain merujuk pada kepentingan seseorang atau beberapa orang di luar diri kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sebaliknya, kepentingan umum dengan sendirinya mencakup kepentingan kita sendiri di dalamnya bersama-sama dengan warga lainnya. Karena itu, budaya *teposeliro* melampaui persoalan etika dalam relasi antara dua pihak atau dengan kelompok sendiri tetapi mencakup kepentingan orang banyak, kepentingan umum. Orang Jawa mengatakan: *Ngono*

yo ngono, neng ojo ngono. Filosofi ini menyangkut persoalan-persoalan dalam hubungan sosial. Di dalamnya terdapat prinsip harmoni dan keseimbangan—sebuah filosofi kebudayaan yang bersifat terbuka, yang memungkinkan terjadinya proses akulturasi dengan budaya lain. Karena itu, dalam perjumpaan dengan budaya lain yang dibawa masuk ke Yogyakarta, budaya Yogyakarta bersifat responsif. Menurut Herry Zudianto—Wali Kota Yogyakarta—adalah budaya *teposeliro* yang membuat budaya Jawa bersifat responsif dan tidak reaktif terhadap budaya lain. Orang lebih terbuka untuk memahami perbedaan dan menempatkan perbedaan itu pada tempatnya, dan tidak serta merta-merta mengambil sikap reaktif seperti penolakan.¹²

Yogyakarta: ‘City of Tolerance’

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa multikulturalisme bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, warisan, tetapi sesuatu yang harus diusahakan dan diperjuangkan secara terus-menerus. Perjuangan untuk mewujudkan multikulturalisme hanya dapat dicapai dari dua aras; masyarakat dan pemerintah. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta memajemen perbedaan kultural warga masyarakatnya dan mencoba memberi tawaran resolusi konflik model Yogyakarta.¹³

¹² Lihat Herry Zudianto, *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultural* (Yogyakarta: Kanisius dan Impulse, 2008).

¹³ Oleh karena bagian ini mengulas mengenai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola perbedaan warganya dan bagaimana manajemen Kota Yogyakarta menjadi kota multikultural, maka bagian ini mengacu pada pendapat Herry Zudianto, *Wali Kota Yogyakarta dalam bukunya Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota*

Menurut Herry Zudianto, selain sebagai kota pendidikan, Yogyakarta juga mendapat predikat sebagai *city of tolerance*. Kedua predikat ini saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk multikulturalisme Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki pengalaman multikultural yang panjang dan teruji, terutama dalam kontak dengan para pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Nusantara untuk belajar di Yogyakarta. Hakikat dan kualitas toleransi yang dimiliki Kota Yogyakarta pun banyak ditentukan oleh relasi-relasi intelektual. Warga Yogyakarta memandang predikat *city of tolerance* yang disandang mempunyai kontribusi terhadap prestasi yang diraih kota ini. Toleransi berarti ada harmoni, ada saling pengertian, dan kesediaan untuk saling menerima, saling mengakui dan mau bekerjasama. Karena itu toleransi dalam konteks ini mengandung makna yang lebih luas melampaui pengertian toleransi antarsuku/etnis, agama dan kebudayaan. Toleransi dalam konteks ini menyentuh aspek struktur sebuah masyarakat di mana tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak terjembatani di dalam masyarakat yang dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat. Karena semangat toleransi dalam pengertian ini pula maka para warga, tanpa membedakan status dan kelas sosial, bisa memiliki tingkat kekompakan yang tinggi dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota sebagai tanggung jawab bersama. Bagi Herry Zudianto, penghargaan terhadap Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya kota yang berhasil menangani pemukiman kumuh, juga penghargaan adipura dan sanitasi—semuanya hanya bisa dicapai karena semua warga kota dari

berbagai latar belakang etnis/suku, agama, afiliasi politik, dan kelas sosial itu kompak, satu bahasa dan satu tindakan bersama-sama dengan pemerintah kota untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih dan nyaman.

Berangkat dari cara pandang di atas, realitas multikultur Kota Yogyakarta tidak hanya menyangkut pengakuan dan memperhitungkan keragaman etnis/suku bangsa, agama, kebudayaan, aliran politik dan sebagainya tetapi juga keragaman kelas sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, profesi, cara pandang, kebiasaan sehari-hari, dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang layak dari pemerintah kota dan masyarakat lain. Manajemen multikultur Kota Yogyakarta harus bermakna melibatkan semua komponen masyarakat tanpa kecuali di dalam sebuah proses pembangunan kota. Toleransi adalah modal pembangunan, terutama dalam mewujudkan rasa aman, tertib, dan damai. Hanya dengan demikian semua warga kota ini bisa merasa diri sebagai anggota satu keluarga besar, sebagai satu komunitas.¹⁴

Salah satu bentuk kebijakan yang mendapat perhatian luas dalam masyarakat Yogyakarta adalah persoalan pemindahan pedagang *klithikan* dari Jalan Mangkubumi ke Pasar *Klithikan*. Terjadi pro-kontra dalam masyarakat terhadap gagasan Wali Kota Yogyakarta untuk merelokasi pedagang *klithikan*. Bagi Herry, pihak yang paling berkepentingan adalah para pedagang *klithikan* itu sendiri. Para pedagang harus dijadikan mitra dalam dialog, diikutsertakan dalam proses pencarian solusi atas perbedaan pendapat dan kepentingan. Sebagai wali kota,

¹⁴ Herry Zudianto, *ibid.*, hlm. 49—51.

Herry mengundang para pedagang untuk bertemu di rumah pribadinya, duduk bersama dan berdialog secara informal dari pukul 21.00 sampai pukul 03.00 pagi. Masing-masing pihak diberi ruang dan kesempatan yang layak dan pantas untuk menyatakan sikap, alasan dan harapan, juga tuntutan mereka terhadap pihak lain. Kedua pihak sepakat untuk saling mendengarkan dan mau secara bersama-sama mencari titik temu ke arah penyelesaian masalah. Akhirnya didapatkan titik temu antara pedagang dan pemerintah kota sehingga akhirnya pedagang pindah ke Pasar *Klithikan*.

Dalam kasus Pasar *Klithikan* di atas, Herry Zudianto mengambil kebijakan dengan cara dialogis. Karena itu, mereka yang berbeda pendapat dan menentang kebijakan diundang ke rumahnya pada malam hari dalam situasi santai. Perbedaan sikap dan pendapat akhirnya terjembatani, kepentingan semua didengar dan diakomodasi, paling tidak dalam kebijakan Pasar *Klithikan*.

Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Herry Zudianto sebagai wali kota mengedepankan dialog dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan. Menurut Herry, itulah esensi demokrasi dan syarat hidup dalam masyarakat multikultural. Demokrasi dan dialog mengandaikan adanya prinsip kesetaraan, kemitraan, dan keseimbangan. Budaya Jawa bahkan mengajarkan lebih dari itu: masih ada keseimbangan antara alam dan manusia.

Dalam memaknai keberagaman Kota Yogyakarta sebagai kota multikultural diperlukan inovasi dan gagasan yang segar dan bernas untuk dapat menjamin eksistensinya sebagai kota multikultural yang relevan dengan perubahan. Dalam konteks itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengakui bahwa ada perbedaan

warga masyarakat dalam hal tingkat sosial dan menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, rasa keadilan masyarakat, berarti tidak ada suatu lapisan masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh strategi pengembangan kota yang terus mengejar kemajuan dan pertumbuhan. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk lima kelompok sasaran gender: kaum miskin, bayi di bawah lima tahun (balita), orang-orang lanjut usia (lansia), kaum perempuan, dan kelompok *difable*. Khusus menyangkut keadilan gender bagi kelompok *difable*, Herry memiliki cara pandang dan kebijakan yang berbeda. Dalam pandangan Herry, kelompok ini harus didekati dengan kebijakan afirmatif yang bersifat pemberdayaan dan menumbuhkan rasa percaya diri—dandengan demikian meningkatkan harkat dan martabat mereka. Mereka tidak bisa dilihat terus-menerus sebagai kelompok sasaran kegiatan afirmatif yang tidak mendewasakan dan cenderung melanggengkan ketergantungan. Pemerintah Kota Yogyakarta—menurut Herry—sedang mempersiapkan Peraturan Wali Kota yang mewajibkan pengusaha mempekerjakan kaum *difable*. Jika kalangan dunia usaha ada yang keberatan mempekerjakan orang-orang cacat karena alasan biaya dan adanya anggapan bahwa orang cacat pasti tidak bisa apa-apa—suatu bentuk stereotip yang keliru—maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan menanggung sebagian dari gaji kaum *difable* itu.¹⁵

Untuk membangun Kota Yogyakarta sebagai kota yang multikultur dan toleran tercermin dalam visi dan misi pengembangan kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94—95.

Yogyakarta baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dalam Rencana Strategik Daerah (RENSTRA). Dalam konteks ini, multikulturalisme, seperti juga halnya toleransi, bukanlah bidang-bidang atau sektor pembangunan yang otonom seperti halnya bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya, melainkan aspek pembangunan. Karena itu multikulturalisme dan toleransi sebagai aspek merupakan dimensi yang harus tampak dalam perumusan visi dan misi serta kebijakan-kebijakan sektoral. Dalam RPJPD misalnya, visi pembangunan Kota Yogyakarta “sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan”.¹⁶

Penutup

Perjalanan sejarah dan kebudayaan Jawa (Yogyakarta) yang telah berlangsung berabad-abad telah menghasilkan modal budaya dan sosial yang sangat terbuka terhadap pihak luar sekaligus dinamis terhadap perubahan. Keterbukaan ini semakin tampak sejak revolusi nasional yang antara lain ditandai dengan dijadikannya Kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Keterbukaan ini semakin bertambah setelah didirikannya universitas revolusi, UGM. Kedatangan berbagai pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia--bahkan mahasiswa asing--semakin menambah keberagaman budaya dan sosial dalam masyarakat Yogyakarta.

¹⁶ RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007—2011, hlm. 58—59, dikutip dalam Herry, *ibid.*, hlm. 96.

Meskipun terdapat keberagaman budaya dan sosial dalam masyarakat Kota Yogyakarta, tetapi ruang budaya dan sosial tetap didominasi oleh kosmos budaya Jawa yang mementingkan kebersamaan dan harmoni yang dibalut dalam budaya *teposeliro*. Dominasi kosmos budaya Jawa pada kenyataannya tidak mematikan budaya-budaya yang datang dari luar, khususnya yang dibawa oleh para pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kedatangan berbagai budaya yang disebut terakhir ini ternyata membawa nilai baru dalam konteks keindonesiaan, yakni menumbuhkan semangat kebangsaan dan keindonesiaan. Secara pribadi, Yogyakarta telah memberi ruang untuk menerima perbedaan sekaligus tetap mempertahankan identitas, membangun saling pengertian dalam suasana kesetaraan. Pada tingkat yang paling sublim, Yogyakarta telah mengajarkan apa makna hidup bersama dalam sebuah ruang yang beragam sekaligus memberi kesempatan pribadi menghayati nilai-nilai keindonesian dan kemanusiaan.

Dalam kaitan dengan multikulturalisme, Pemerintah Kota Yogyakarta mengelola keragaman warganya dengan kebijakan-kebijakan yang populis, dalam pengertian kebijakan yang diambil senantiasa memperhatikan kebutuhan semua komponen masyarakatnya, tidak saja dari segi etnis, ras, agama, tetapi juga pada aspek kesejahteraan sosial untuk memenuhi rasa keadilan sosial warganya. Dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, pemerintah senantiasa membuka diri untuk berkomunikasi dan berdialog dengan warganya dalam semangat toleransi. Cara ini mencerminkan semangat multikulturalisme, oleh karena dialog dan toleransi merupakan pandangan yang esensial dari multikulturalisme.

Semangat dialog dan toleransi bukan hanya cara untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga jurus yang paling ampuh untuk menghindari konflik.

Daftar Pustaka

Faruk, dkk. (Tim Peneliti)

1999 *Pengalaman, Kesaksian, dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta: Hasil Penelitian tentang "Hubungan Antaretnis dan Iman di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta.* (Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei bekerjasama dengan LP3ES).

Ki Supriyoko (Editor)

2005 *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Sejarah.* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata).

Soemardjan, Selo

2009 *Perubahan Sosial di Yogyakarta.* (Jakarta: Komunitas Bambu).

Surjomihardjo, Abdurrahman

2008 *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880—1930.* (Jakarta: Komunitas Bambu).

Suryo, Djoko

2005 "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900—1990", Freek Colombijn, dkk. (editor), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak bekerjasama dengan NIOD dan Jurusan Sejarah UNAIR), hlm. 30-43.

Warnaen, Suwarsih

2002 *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis.* (Yogyakarta: Mata Bangsa).

Zudianto, Herry

2008 *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur*. (Yogyakarta: Kanisius bekerjasama dengan Impulse).

DIALOG ANTAR PEMELUK AGAMADAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Damardjati Supadjar

Pengantar

Nabi dan Nabi, silih berganti, kurang lebih setiap 500 tahun, mereka itu semuanya: Alaihi salam, serta “maksum”, terbebas dari kesalahan. Di sisi lain tidak ada jaminan bahwa umatnya selalu benar dalam mencerna serta memahami ajaran Nabinya. Maka hadirnya Nabi yang belakangan bukannya untuk mengoreksi Nabi sebelumnya. Yang dikoreksi justru kesalahan umat terdahulu dalam memahami serta mengikuti ajaran Nabinya. Nabi Isa Ruhullah As. sama sekali bukan untuk mengoreksi Nabi Musa Kalimullah As. Yang dikoreksi adalah kesalahfahaman umat Yahudi. Demikian pula Nabi Muhammad Saw. sama sekali bukan untuk mengoreksi Nabi Isa As. yang beliau koreksi ialah kesalahan umat Kristiani.

Maka kalau umat Muhammad Saw. salah dalam memahami ajaran beliau, kepada siapa mereka “*tawadhu*” *amari-kelu*, sementara setelah Muhammad tiada lagi Nabi? (*La Nabiya ba'da*). Disinilah letak pentingnya suatu forum dialog. Forum demikian itu harus dikelola secara ilmiah, karena “pewaris kenabian itu adalah orang-orang berilmu/alim-ulama, yang bidang garap/profesinya mencakup wilayah yang sangat luas.

Kini umat manusia berada pada abad ke-21, berarti telah berlalu masa 15 abad dunia internasional menyaksikan berbagai

temuan-temuan ilmiah, yang di samping menyajikan gaya hidup yang modern (ilmiah atau teknologis) juga disertai berbagai dampak negatif terutama berkenaan dengan hal-hal ekologis. Jadi dialog itu tidak hanya “antaragama dan kepercayaan” saja, melainkan juga antara agama dan ilmu pengetahuan khususnya/kebudayaan pada umumnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa dunia sebagai suatu sistem lambat sekali dalam menangani “Kehendak Ilahi”, Dunia baru mulai memahami “bahasa tongkat” Nabi Musa As. yakni “bahasa” teknologi/teknokrasi. Dunia memahami “bahasa ruh” sebagaimana yang dipersonifikasi oleh Nabi Isa, Rahullah As. apalagi “bahasa penghubung makhluk dan khaliq “yakni bahasa *akhlaqul karimah*, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Itulah kesan adiluhung dibalik ungkapan “hamemayu hayuningrat”.

Syarat-Syarat Suatu Dialog

Suatu Dialog mensyaratkan lebih dahulu suatu mukaddimah akbar sebagai acuan awal bersama. Dalam hal ini ialah kenyataan bahwa Republik Indonesia itu bukan suatu negara agama, tetapi juga bukan suatu negara sekuler. Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu dialog itu juga harus tetap sesuai dengan kaidah asas-asas kebudayaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni “Asas Trikon” (Konsentris dengan Jatidiri Bangsa, Kohergen terhadap faktor-faktor pendukung, serta demi kontinuitas kemajuan bangsa. Dengan demikian hulu-hilir wacananya pun mengalir dari “hulu” kearifan lokal yang tetap bermuara pada “laut” Indonesia yang satu dan sama. Itulah “tuah sakato”, kesepakatan bersama yang membawa tuah,

bahkan halnya tetap mengalir ke skala global. Gotong-royong sebagai intisari Pancasila, sesungguhnya identik dengan filsafat organisme/filsafat proses, yang memandang semesta segala ini sebagai “berstruktur” (lahir-batin) serta “berproses (awal-akhir). Di dalam budaya Jawa yang demikian itu telah berkembang mapan, berupa ajaran “pamoring kawula gusti” serta “sangkan paraning dumadi”.

Bagi orang kebanyakan, terutama orang Jawa kalau mendengarkan ungkapan “sangkan paraning dumadi”, mereka segera memahaminya dalam kerangka: *Inna-lillahi wa inna ilahi raji’un*, sementara mereka yang mempelajarinya secara kefilsafatan harus menerangkan atau membedakan antara *the continuity of becoming* dengan *the becoming of continuity*. Demikian pula dalam hal istilah keseharian “lahir batin”, padahal justru “membaca itu mendapatkan yang batin dari yang lahir ‘, sedangkan menulis itu melahirkan yang batin”.

Apakah yang dituju oleh suatu dialog? Indikator apa saja yang memperlihatkan berhasilnya suatu dialog?

1. “Dada menjadi lapang’, menerima kenyataan keanekaragaman budaya, namun mampu menangkap kesatuan asas di belakangnya. Itulah makna seloka Bhinneka Tunggal ika/”*Tanhana dharma mengrwa*”.
2. Pendirian diperkuat, namun lentur dalam penampakan (tulang punggung menjadi makin kokoh namun tetap lentur)
3. Beban dirasa menjadi ringan (ringan sama dijinjing/ berat sama dipikul)
4. Ingatan ditinggikan secara intelektual dan moral, sadar bahwa realitas itu bertingkat (lahir-batin) dan berproses (awal-akhir)

5. Sadar penuh akan hukum kejadian, bahwa “beserta kesulitan itu kemudahan” (berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian)
6. Berprestasi ba'da prestasi; namun bukannya prestasi untuk prestasi, melainkan sebagai persembahan mengharap ridha Ilahi (bandingkan dengan QS 94: 1-8).

Tema-Tema Dialog

Dien atau dharma itu mencakup agama dan budaya. *Lex Divina* itu mengatasi *Lex Natural* dan *Humana*. Pencerahan sebagaimana yang dialami Sidharta Gautama sehingga menjadi Budha, “berhenti” di Borobudur; dunia tidak semestinya “berhenti” pada bahasa tongkat seorang Musa As.

Perwujudan bahasa “tongkat” itu tidak lain adalah teknologi/teknokrasi/ teknosofi, yang memang menyajikan sejumlah kemudahan hidup, namun tidak bebas dari hal-hal negatif, yang melalaikan dari hal-hal hakiki yang lebih asasi. Dunia kini tengah menyongsong bahasa “ruh”, firman yang membadan, yang di kandung oleh Virgin Mariam, lambang kepekaan diri penuh kerawanan, yakni ekologi tanpa residu. Dengan mempergunakan metode analogi, antara Mariam dengan Mataram. “Firman yang membadan” dengan jiwa (*kang ka*) Jawi, maka Insya Allah dialog ini akan melahirkan momentum yang ditunggu-tunggu yang di”antu-antu”. Suatu indikator mengenai masalah besar ialah ungkapan Jawa: “*curiga manjing warangka*”, yang oleh karenanya manusia lalu berfungsi sebagai mikrokosmos, sementara “*warangka manjing curiga*” mensyaratkan perubahan paradigma, yakni manusia sebagai makrokosmos dalam hal ruhnya atau jiwanya.

Logika Ketuhanan, Agama dan Himpunan

Dalam hal logika himpunan, berlakulah rumus $S > P$, dalam arti S (Subjek lebih sempit daripada P /Predikat; S lebih konkret daripada P); sementara dalam hal agama $S = P$, dalam arti jaminan objektivitas bebas dari faktor subjektif. Bagaimana halnya dengan ketuhanan? Sesungguhnya $S > P$, artinya subjek Ilahi selalu melebihi predikat; kalau saja lautan sebagai “tinta” dari “tangkai tetumbuhan” sebagai batang penanya maka semua fenomena belum mampu memuat keluasaan ilmu-Nya.

Beberapa contoh kenyataan sehari-hari yang kurang diperhatikan:

“Titik” itu tidak ada, kecuali dalam rangka “garis”

“Garis” itu tidak ada, kecuali dalam rangka “bidang”

“Bidang” itu tidak ada, kecuali dalam rangka “ruang” dan “waktu”

“Ruang” dan “waktu” itu tidak ada, kecuali dalam rangka firman Tuhan.

Dengan demikian firman Tuhan itu mengatasi segala bahasa, kalimat dan kata, lintas batas ruang dan waktu, budaya, negara dan bangsa, transenden namun sekaligus immanen/awal-akhir, lahir-batin. Kalau anda ditanya :“anda dari mana?”, dan anda menjawab: “dari Ponorogo”, maka itulah jawaban atas pertanyaan yang lain, yakni :“anda lahir di mana ?” Sedangkan kalau jawabannya “dari rahim Ibu”, maka itu benar menurut sudut pandang ilmu kebidanan. Anda lahir dari batin, maka sungguh penting untuk selalu ingat akan pesan Prof. Dr. Mr. Soepomo, bahwa perjalanan kebersamaan kita mengindonesia itu akan bertemu dengan berbagai persimpangan jalan sehingga supaya tidak sesat, kita harus selalu memegang suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) perekat (awal-akhir, lahir-batin).

Hulu-hilir/Hilir-Mudik Kehidupan

Tesis utama Ketuhanan Yang Maha Esa ialah bahwa : Tuhan itu Maha Esa. Berbahagialah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan itu penting sebagai landasan kehidupan bersama, horizontal-vertikal (*hablu minnan-nas/hablu minnallah*)

Hidup keseharian, hari demi hari intinya ialah laku penjumlahan, padahal berapapun satuan nominal dijumlah tidak pernah akan mencapai kualitas infinitum. Di sisi lain hidup itu ialah pengulangan dan pengulangan berkali-kali; sementara hasilnya juga tidak pernah mencapai infinitum (lambang Ilahiah). Bagaimana dengan pemangkatan? Pangkat/bintang 4 (Jenderal penuh), Bintang 5 (Jenderal besar), Bintang 6 (Marsekal-Jenderal), Bintang 7/malah puyer obat masuk angin.

Satu-satunya jalan ialah istiqomah. Berapapun satuan terminal eksistensial, manakala dibagi 0/nol, hasilnya justru infinitum/tak terhingga. Pembagian nol itu nafi total; Infinitum itu "isbat total". Itulah kesaksian "*udheng-mudheng nyo sami-aji*", raja tanpa mahkota, yang darah seluruh tubuhnya putih dalam arti tidak punya apa-apa, termasuk tidak punya rasa punya.

"*Ningna-na, sajatine ora ana apa-apa*"; "*kajaba Kang Kandha*". Inilah laku Murwa Kanda sekaligus Murwa-Kala.

POLITIK IDENTITAS, KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN KEINDONESIAAN

Arie Sujito

Perdebatan tentang politik identitas dalam arus perubahan yang terjadi saat ini, mendorong kita untuk makin reflektif, terutama mensikapi kecenderungan ketegangan haluan antara golongan yang bercokol pada paham "keras" dan "moderat" dalam menafsir dan menanggapi perbedaan dalam wilayah struktur masyarakat yang plural. Baik itu paham dalam area agama, etnik, afiliasi politik, maupun konstruksi sejenisnya. Hal ini sungguh menarik dan penting untuk dipertukarkan dalam cara pandang, informasi dan data serta kebutuhan untuk membangun konsensus dalam sebangun keindonesiaan.

Tulisan ini sebenarnya akan mengajak untuk mendiskusikan tema pluralisme serta secara spesifik menyusuri perdebatan mengenai konstruksi dan dinamika keistimewaan Yogyakarta dalam kaitannya dengan multikulturalisme dan demokrasi.

Dinamika Lokal

Tentu saja diskusi akan menarik jika mengaitkan tema keistimewaan dengan kecenderungan menguatnya politik identitas semenjak desentralisasi dan demokrasi lokal menjulang ke permukaan di zaman reformasi. Di situlah, membaca tentang menebalnya spirit identitas (etnik kedaerahan, termasuk soal

agama dan aliran politik) perlu dibaca secara tepat dan kritis agar tidak terjebak pada pretensi negatif yang justru mereduksi demokrasi. Semenjak kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi diterapkan melalui regulasi Undang-undang No. 22 Tahun 1999, arus penguatan dinamika lokal terus terjadi. Di daerah-daerah dilakukan restrukturisasi kelembagaan politik (birokrasi dan parlemen), yang berjalan seiring dengan tumbuhnya inisiatif pembangunan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil di berbagai arena.

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah jelas telah mengakibatkan berlangsungnya proses lokalisasi politik pada level kabupaten/kota sampai ke desa. Distribusi kekuasaan politik bisa langsung dirasakan oleh masing-masing pemerintahan daerah yang lebih otonom daripada sebelumnya. Peristiwa politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sejak pertengahan tahun 2005 yang lalu, itu merupakan salah satu indikasi paling kuat dari dinamika yang muncul akibat pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah tadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pilkada langsung telah mendorong bangkitnya partisipasi masyarakat sipil dalam ruang-ruang politik baru yang tercipta karenanya. Salah satu isu krusial yang muncul mengiringi proses otonomi daerah saat ini adalah berlangsungnya berbagai proses penguatan politik identitas yang, antara lain, muncul berbentuk upaya integrasi ajaran keagamaan ke dalam sistem pemerintahan di masing-masing daerah.

Di bagian lain, ruang besar yang dimiliki daerah dalam skema demokratisasi, justru menstimulasi tumbuh dan pembengkakan sentimen kelompok dengan kandungan nilai etnik, agama, dan afiliasi kedaerahan. Berbagai cara untuk memasukkan spirit

eksklusif dengan mengabaikan derajat kemajemukan masyarakat, makin marak. Hal itu pertanda, seolah demokrasi memberikan hak apapun untuk menyampaikan dan mengartikulasikan dengan spirit kelompok. Di titik itulah, masalah itu muncul. Demokrasi yang memilah domain *public* dengan *private*, telah terjadi gejala penumpangtindihan. Soal-soal yang semestinya menyangkut urusan *private*, misalnya identitas agama atau etnik, dimasukkan pengaturannya dalam domain *public* berupa regulasi. Akibatnya, distorsi menjadi tidak terhindarkan. Munculnya Peraturan Daerah yang berisikan soal agama atau sentimen etnik menjadi masalah krusial yang mengurangi bekerjanya ruang pluralisme dan multikultur dalam praktek demokrasi.

Peristiwa kekerasan komunal memang secara luas dan mencolok menandai episode akhir rezim Orde Baru yang otoriter dan sentralistik. Sejauh itu, banyak teori dikemukakan untuk menjelaskan fenomena ini seperti “efek krisis ekonomi”, “patologi sosial masyarakat tertindas” dan “rekayasa elite untuk tujuan-tujuan politis tertentu”. Dapat saja dipahami bahwa keseluruhan teori di atas benar semua, atau masih ada hal-hal lain yang belum dijelaskan dengan teori-teori itu, namun apapun penjelasannya, satu hal perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa situasi penuh kekerasan bukanlah hal baik. Ia bukan kondisi bagi suatu perbincangan yang sehat tentang masa depan bangsa dan negara. Di samping itu, wacana sentimen identitas kelompok atau soal politisasi perbedaan yang dipaksakan di dalam dan melalui situasi yang *chaotic*, dalam banyak hal justru dapat melahirkan hal-hal yang kontradiktif dalam konteks kebangsaan yang plural.

Soal Keistimewaan

Bagaimana kita memahami soal keistimewaan dalam koridor multikulturalisme dan demokratisasi? Mari kita lacak dulu substansi pengaturan mengenai keistimewaan dalam tafsir sosio-kultural dan dimensi politik. Tiga isu yang mengisi substansi keistimewaan adalah menyangkut struktur kepemimpinan pemerintahan daerah Yogyakarta (pengisian jabatan gubernur terkait dengan kesultanan), soal tanah dan hukum yang mengaturnya serta kebudayaan lokal. Sejah ini, pembahasan atas ketiganya tidak berimbang karena lebih condong pada sengketa soal pengisian jabatan gubernur, apakah melalui pemilihan ataukah penetapan. Apalagi, dalam prosesnya sering kali muatan-muatan politik yang sifatnya kepentingan jangka pendek lebih kental dibandingkan visi dan nilai-nilai mendasar untuk kebutuhan jangka panjang.

Konstruksi istimewa jelas erat kaitannya dengan historis. Jika kita tengok dalam rentang sejarah bergabungnya Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono IX saat itu dilandasi oleh pemikiran yang mendalam bahwa eksistensi Yogyakarta hendaknya terkandung prinsip nilai-nilai keindonesiaan yang multikultural, sifatnya nasional. Yakni sejak bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka dari kolonialisme. Membangun Indonesia berarti membangun Yogyakarta, dan sebaliknya. Atas dasar itu, jika ditafsirkan secara mendalam, cara pandang bagi pengembangan daerah Yogyakarta berarti membangun keindonesiaan, NKRI.

Paham semacam ini mengisyaratkan, agar tidak boleh terjebak pada eksklusivisme, ataukah mengisolasi dari struktur dan dinamika keindonesiaan sebagai struktur masyarakat yang lebih besar. Karena Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dulu saat

berkehendak bergabung ke NKRI, konsekuensi atasnya adalah, penghargaan pemimpin dan rakyat Indonesia pada penguasa dan rakyat Yogyakarta atas pengorbanannya berupa pengakuan sebagai Daerah Istimewa. Dalam arti positif, dinamika Yogyakarta dimengerti secara dinamik seiring dengan perkembangan peradaban kebudayaan dan konteks politik yang berlangsung, baik di level lokal dan nasional. Berkait dengan itu, politik identitas dalam konstruksi keistimewaan menjadi bagian substansi kebangsaan dan keindonesiaan.

Dalam proses itulah, diharapkan terjadi dialog kebudayaan dan politik antara keistimewaan dan keindonesiaan secara terus menerus. Artinya, cara pandang keistimewaan bukanlah statis tetapi dinamis.

Dengan demikian, atas dasar itu, kita harus mengurangi kecenderungan reproduksi nalar dan ideologi, kemungkinan dibalut kepentingan jangka pendek, seolah-olah keistimewaan Yogyakarta hanyalah milik warga Yogyakarta. Padahal, keistimewaan Yogyakarta adalah bagian integral milik warga Indonesia, seperti diisyaratkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena itu, pemahaman keistimewaan adalah Yogyakarta dalam nasionalisme keindonesiaan.

Apa dan bagaimana kira-kira cara pandang keindonesiaan sesuai dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan konstitusi UUD '45? Di antaranya persatuan dalam keberagaman (pluralisme), terwujudnya keadilan dalam kebijakan, pencapaian kehidupan warga bangsa yang sejahtera. Atas dasar itu, wawasan keistimewaan hendaknya dibangun dalam konteks bagaimana Yogyakarta merupakan daerah yang di dalamnya senantiasa menghargai perbedaan dalam keberagaman (etnik, agama, afiliasi politik) dengan prinsip-

prinsip demokrasi, yang tentunya mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Sekarang kita perlu berpikir dan mengingat sejenak, dengan keistimewaan yang melekat, apakah kita secara konsisten telah mampu membebaskan Yogyakarta dari bentuk-bentuk diskriminasi dalam etnik, agama, dan aliran politik? Kita kadang masih melihat fakta kekerasan ketika terjadi penyerangan suatu kelompok pada kelompok lain yang mengatasnamakan agama atau ideologi politik di Yogyakarta. Peristiwa demikian itu jelas bertabrakan dengan cita-cita mulia keistimewaan Yogyakarta.

Demikian pula, sebagai daerah istimewa, hendaknya Yogyakarta menjadi daerah yang mengekspresikan kebijakan-kebijakan yang adil, tidak diskriminasi dan menjadi pelopor daerah-daerah lain di bidang sosial dan ekonomi. Konstruksi keistimewaan Yogyakarta terlekat dengan komitmen kerakyatan, maka sudah seharusnya keistimewaan ditandai kebijakan-kebijakan negara yang berwawasan kesejahteraan warga, dan bukan sebaliknya.

Memasukkan Kesejahteraan

Kita tidak boleh menutup mata pada fakta mengenai bermacam praktik pengusuran pada hunian warga atau pedagang kaki lima, marginalisasi kaum miskin atau petani akibat ekspansi perdagangan besar, banyaknya pengangguran dan urbanisme keluar Yogyakarta, serta makin terasa kesengsaraan warga akibat kebijakan harga yang tidak menentu. Kita berharap, soal-soal semacam ini diperhatikan saat keistimewaan dikonstruksikan ulang. Dengan kalimat ringkas, sejarah keistimewaan Yogyakarta berkait erat dengan cita-cita kerakyatan, bukan memenuhi selera kaum aristokrat, elite-elite politik lokal, maupun nasional. Nilai-nilai mulia itu jangan ditutup-tutupi, apalagi terdistorsi oleh

kegiatan mobilisasi kepentingan elite lokal maupun hasrat elite nasional. Semoga kita bisa makin jernih berpikir, menemukan jawaban sesungguhnya mengenai keistimewaan Yogyakarta. Penghargaan atas historis, dan pandangan kekuasaan yang demokratis dalam menata hubungan pusat dan daerah, sebagaimana soal keistimewaan itu hendaknya memasukkan orientasi kesejahteraan masyarakat ke dalamnya.

Mengapa hal ini penting, karena bentuk kekuasaan apapun dituntut untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, sebagaimana diilustrasikan di depan. Pembenanaman debat substansial mengenai demokratisasi dan kesejahteraan ini menjurus pada kebutuhan penggunaan nalar akuntabilitas kekuasaan oleh sang penguasa kepada pemberi mandatnya, yakni rakyat.

Dalam kacamata kritis, agenda mendasar yang perlu dipikirkan tidak lain adalah, bagaimana demokratisasi sebagai fakta politik yang memiliki legitimasi secara historis dan politik terus direproduksi, dikembangkan dan dibangun. Konsekuensi di dalamnya adalah; prinsip menghargai kemajemukan (etnik, agama, maupun kedaerahan) harus menjadai dasar membangun daerah dan bangsa ini, sekaligus tidak terjebak pada simplifikasi yang menyesatkan. Dalam skema desentralisasi dan demokratisasi itulah, perbedaan cara pandang harus dihargai, apapun itu, karena keindonesiaan berarti kemajemukan. Doktrin *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bingkai keragaman dalam satu keindonesiaan. Jika masuk pada wilayah silang carut atau sengketa mengenai haluan kelompok keras yang kian memaksa pada arah monokulturalisasi, jelas itu berarti mengerosi kesepakatan kebangsaan dan kemajemukan. Terlebih jika demokrasi ini dijalankan dengan konsisten dan benar, maka multikulturalisme harus dianggap sebagai semen perekat bangsa

ini. Demikian pula, soal keistimewaan tentu harus dibahas dalam konsteks demokratisasi itu dan dengan mengarahkan pada konteks keindonesiaan sekaligus memadukannya dengan kesejahteraan. Inilah tantangan kita saat ini.

Agenda Keindonesiaan

Kita harus secara jernih mengatakan dan menilai bahwa makin meluasnya politik identitas di berbagai daerah, sebagaimana diekspresikan dari kecenderungan formalisasi agama, sikap etnisitas yang berlebihan dalam beberapa regulasi seperti Perda, atau Undang-undang yang memangkas kemajemukan, afiliasi kedaerahan yang egositik, besar kemungkinan akan makin menurunkan kualitas demokrasi lokal. Bangkitnya suara rakyat yang pada mulanya secara baik tersalurkan melalui arena-arena partisipasi baik pada aras elektoralisme maupun asosiasi-asosiasi sipil, kini makin terpinggirkan akibat ulah politisi lokal yang senantiasa memasukkan agama, hasrat etnistias, atau afiliasi kedaerahan dan kelompok ke dalam dan mereduksinya menjadi kepentingan politik jangka pendek. Koalisi parlemen dengan eksekutif yang cenderung mempromosikan pendekatan pragmatis untuk menarik perhatian masyarakat, sebagaimana terurai dalam risalah-risalah politik mengkonstruksi bermacam aturan di daerah, kian memperkuat bukti betapa demokrasi dan ruang-ruang tempat masyarakat sipil berproses semakin terancam justru oleh buah dari proses "kemandegan demokratisasi" itu sendiri. Para aktivis prodemokrasi sudah mengingatkan hal semacam ini, ketika mereka menyatakan bahwa demokrasi berada dalam ancaman akibat maraknya pembajakan demokrasi oleh ulah para politisi di daerah.

Pengalaman demokratisasi pada tingkat lokal di beberapa

daerah di Indonesia, sangat jelas memperlihatkan gambaran tentang demikian besarnya upaya orang atau sekelompok orang untuk menggunakan agama, sentimen etnik dan afiliasi kedaerahan sebagai komoditas demi kepentingan politiknya sendiri. Dalam kasus-kasus tersebut, agama tidak pernah benar-benar menjadi acuan sesungguhnya dari tingkah laku politik para politisi, melainkan semata sebagai komoditi di tangan para petualang politik yang menukar substansi demokrasi dan ajaran agama dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk meraih dukungan massa dalam kontestasi politik lokal. Salah satu resiko besar dari kecenderungan semacam itu adalah makin besarnya kekhawatiran bahwa agama memang tidak pernah kompatibel dengan demokrasi.

Dengan kalimat lain, yang akan muncul adalah kecurigaan bahwa demokrasi tidak bisa mengakomodasi artikulasi kepentingan pemeluk agama, dan agama tidak akan pernah bisa memperdalam kualitas demokrasi. Lebih dari itu, dari praktek-praktek formalisasi agama yang banyak dijumpai sejauh ini, mulai pula muncul kecemasan bahwa penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat justru bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kalau kekhawatiran tersebut menemukan bukti empirisnya di lapangan, ini tentu saja merupakan berita sangat buruk bagi proses pengembangan demokrasi lokal di Indonesia.

Di samping itu, hal yang sama juga merupakan pukulan politik bagi pengembangan kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat kita. Padahal, pada saat yang sama hampir semua orang percaya bahwa semua itu bukan diakibatkan oleh nilai yang terkandung dalam agama, melainkan oleh praktek-praktek persekutuan antara kepentingan politik jangka pendek dengan

kenyataan bahwa agama adalah sebuah sumber legitimasi yang masih bisa dipakai untuk menggalang dukungan. Lebih dari itu, hal-hal yang mencemaskan tadi terjadi akibat praktek-praktek beragama yang justru membatalkan pemaknaan agama untuk kegiatan yang positif sebagaimana diperintahkan Tuhan dalam misi suci agama.

Karena itulah sangat penting untuk menempatkan relasi agama dan demokrasi dalam bingkai pemahaman yang lebih terbuka dan kritis. Dalam konteks pengembangan demokrasi (lokal), agama harus ditempatkan sebagai sebuah kekuatan pendukung terutama dalam fungsi dialog, praktek toleransi dan kerjasama dalam keragaman. Di beberapa daerah, hal semacam ini justru telah menjadi praktek hidup masyarakat lokal sejak lama. Praktek tersebut mengalami kemunduran oleh munculnya tendensi-tendensi formalisasi dan bahkan purifikasi agama belakangan ini. Ironisnya, tendensi-tendensi tersebut sejak awal bersembunyi di balik dalih upaya untuk mengatasi bermacam-macam persoalan sosial dalam hidup masyarakat, tapi yang dihasilkannya sungguh jauh panggang dari api. Kalau pun praktek-praktek formalisasi agama harus dipahami sebagai bagian dari dinamika awal proses demokratisasi lokal di Indonesia, maka itu artinya sejak awal demokrasi justru hanya mengakibatkan semakin bertambahnya beban kesulitan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Kalau demokrasi sejak awal hanya menjadi beban, animo masyarakat semakin lama akan semakin berkurang, dan pada gilirannya demokrasi lokal akan berhenti semata sebagai sebuah jargon tanpa substansi dalam praktek kehidupan. Mungkin karena itu para politisi sebaiknya sejak sekarang harus banyak belajar tentang demokrasi tidak melalui studi banding melainkan dari rakyatnya sendiri.

Untuk Keindonesiaan

Satu soal yang tidak kalah kompleksnya adalah soal identitas. Dari mulanya soal identitas itu perkara simbol, penampilan. Hasrat akan identitas, untuk dikenali, adalah bagian dari eksistensi kemanusiaan. Namun ia bukan hal yang ajeg dan terberi, bawaan lahir yang akan terbawa mati, melainkan sesuatu yang selalu berkembang, mengkerut, bercabang, mengkerucut, kompleks dan kontekstual, tergantung pada “ruang dan waktu” tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pembentukannya dan konjungtur sosial, ekonomi, politik, budaya yang ikut membentuknya. Bagaimana perubahan dari identitas yang hakekatnya campur aduk, pertalian banyak aspek yang tidak selalu hitam-putih dan linear, menjadi identitas tunggal yang hitam-putih dan linear: menabrak apa pun yang menghalanginya. Dalam hal ini, salah satu kuncinya, adalah “komunikasi nasional” dan penciptaan sistem kemasyarakatan yang adil, yang dapat menjamin dan menjaga semua warganya dari rasa keterasingan dan keterpinggiran, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun budaya.

Demokrasi tentu saja merupakan salah satu, kalau bukan satu-satunya, sistem yang memberi ruang perdebatan publik untuk mencari nalar publik bagi negara dan bangsa. Demokrasi juga sistem yang justru berpatok pada kesetaraan akses dan perlakuan bagi seluruh warganya. Demokrasi juga sistem yang bersumber pada penghormatan akan hak asasi manusia, termasuk menjamin kebebasan warga memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tapi kebebasan ini bukan tanpa syarat, karena di balik itu ada asumsi bahwa negara tidak punya hak mencampuri kehidupan beragama warganya. Karena itu setiap tendensi ke arah pentotalan

kehidupan warga di atas dasar agama tertentu jelas merupakan pelanggaran kaidah-kaidah demokrasi. Demokrasi tidak bisa berjalan seiring dengan proses penumpasan keragaman. Demokrasi hanya bisa kompatibel dengan sebuah kondisi yang bisa memungkinkan semua perbedaan identitas berkembang bersama saling menguatkan.

Itulah tantangan kita saat ini yang tidak boleh dianggap remeh. Belajar dari pengalaman yang berhasil dipotret dalam riset ini sebuah agenda penting yang harus segera dilakukan adalah: *Pertama*, membenahi ulang pemahaman soal agama dan etnisitas dengan landasan nilai-nilai kritis dan kontekstual. *Kedua*, perubahan dan peluang menata ulang sistem politik dan kehidupan sosial di aras lokal perlu memperhatikan aspek-aspek kultural, dengan maksud agar demokrasi lokal dapat bekerja dan menjadi tempat bersemainya kebudayaan lokal yang beragam. *Ketiga*, membumikan agama pada aras lokal sesuai dengan fungsinya menjawab masalah-masalah manusia, mencegah terabsorbsinya entitas kultural keberagamaan ke dalam bentuk formalisasi politik negara. *Keempat*, membuka, memelihara dan menyemai ruang-ruang sipil dalam berekspresi-bebas, toleran, dan penuh solidaritas sebagai ciri dasar demokrasi lokal. Di sanalah *civil society* akan makin kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah diterpa oleh langkah-langkah destruksi kaum otoritarian. Keseluruhan upaya ini haruslah dimasukkan dalam bingkai mempertahankan demokrasi konstitusional.

Indonesia hanya akan menjadi sebuah bangsa yang besar jika ia dibangun di atas landasan masyarakat yang toleran, solid, dan memegang kebersamaan.

Setelah lebih enam puluh tahun meraih kemerdekaan politik, bangsa ini seharusnya tidak lagi mudah terjerumus dan hanyut

dalam kejumudan soal relasi antarkelompok yang menghambat peradaban. Di luar itu masih banyak soal-soal besar yang jauh lebih penting, lebih menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus segera diselesaikan. Salah satu tantangan pengembangan demokrasi di Indonesia saat ini adalah bagaimana agar upaya-upaya perbaikan sistemik dalam tata kelola kenegaraan itu bisa membawa maslahat bagi kehidupan konkret rakyat sehari-hari. Oleh karena itu, daripada hanya diributkan oleh praktek-praktek politik sektarianisme dan identitas, fokus besar perjuangan demokrasi di Indonesia adalah penyelesaian persoalan-persoalan mendasar seperti beban kemiskinan, kesenjangan sosial, pemberantasan korupsi, ancaman disintegrasi sosial, serta perwujudan cita-cita kesejahteraan sosial.



Tim kerja lokakarya multikulturalisme tahun 2009. Dari kiri-kanan:
Sri Suharni, Titik Umi Kurniawati, Sri Rahayu Budiarti, Christiyati, M.
Alimuddin, Sugiyanto, Nurrokhim, dan Muslimin A.R. Effendy

TENTANG PENULIS

AGUS MALADI IRIANTO lahir di Wonosobo, 4 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan sarjana (Drs) dalam bidang Sastra Indonesia di Universitas Diponegoro Semarang (1986). Gelar Magister (MA) diraih dari jurusan Antropologi Universitas Indonesia (1996), dan Doktor (Dr.) dalam bidang Antropologi Media dari universitas yang sama (2008).

Karya-karyanya antara lain; *Pencarian Identitas dan Integrasi Kebudayaan pada Masyarakat Multikultural*, disajikan dalam Seminar Internasional “Keanekaragaman Budaya sebagai Perikat Keutuhan Bangsa Menuju Indonesia Baru” dalam rangka Lustrum VIII FS. Undip Tahun 2005. *Narasi Perempuan dan Media, Sebuah Kontestasi Kekuasaan*, disampaikan pada diskusi nasional “Perempuan dan Komodifikasi Seksualitas” diselenggarakan Kajian Perempuan Desantara di Jakarta Tahun 2007. *Kebudayaan, Media, dan Kekuasaan*, disampaikan pada Seminar Nasional “Kebangkitan Nasional & Kebangkitan Pers Indonesia” pada 4 Juni 2008 diselenggarakan oleh PWI Cab. Jawa Tengah, Semarang.

Buku-buku yang telah diterbitkan; *Tayub, antara Ritualitas dan Sensualitas Erotika Petani Jawa Memuja Dewi*, (Semarang: Lengkongcilik, 2005). *Epistemologi Kebudayaan: Isu Teoritik Dalam Karya Etnografi*, (Semarang: Lengkongcilik, 2008); *Kemiskinan Struktural Di Jawa Tengah: Studi Kasus Komunitas Adat Terpencil* ((Semarang: Lengkongcilik, 2008); *Kebudayaan Populer, Dari Televisi Hingga Tato di Pipi* (Semarang: Lengkongcilik, 2008). Email:agusmaladi@undip.ac.id

ARIE SUJITO lahir di Madiun, 12 September 1972. Staf Pengajar Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (1999-sekarang), Pengajar Pascasarjana Sosiologi

Fisipol Universitas Gadjah Mada (2005-sekarang), Pengajar Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (2007-sekarang), dan Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (2007-2009). Direktur Eksekutif, *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional (DPN) Pergerakan Indonesia (2005-2008).

Banyak melakukan penelitian mengenai isu-isu demokrasi, militer, otonomi daerah, pembangunan dan perdamaian, dan kebijakan publik. Pada tahun 1997-1998 meneliti mengenai "Pengembangan Pluralitas Wacana Demokrasi di Kalangan *Young Communities Leaders*", dan "Need assessment dan Analisis Media: Pengembangan Jaring Pengaman Politik" dengan bantuan dana dari *Institute for Research and Empowerment-Pact/INPI*. Peneliti pada Program "Demiliterisasi Masyarakat Lokal", "Membangun Kontrol Sipil Terhadap Militer dalam Konteks Demokratisasi", dan "Demiliterisasi dan Desentralisasi" yang didukung oleh *Institute for Research and Empowerment-Usaid* tahun 2000-2001; "Desa Pasca Negara Ototeriter" (Yayasan Percik Salatiga, 2003); "Pemberdayaan Adat dalam Kerangka Demokratisasi" (*Institute for Research and Empowerment-European Commission*, 2002-2004); "Pemetaan Konflik SARA dan Resolusi Untuk Integrasi Bangsa" (Kasus Aceh dan Ambon) (Unit Studi Konflik Jurusan Sosiologi UGM-Ristek LIPI, 2001-2002); "Pengembangan *Good Governance* Dalam Konteks Otonomi Desa" (*Institute for Research and Empowerment-Ford Foundation*, 2001-2002). Menulis beberapa buku, antara lain; 1). *Dari Elitisme Menuju Populisme: Pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Era '90-'98 (Pergolakan Melawan Kekuasaan)* (Pustaka Pelajar, 1999), *Masyarakat Pasca Militer* (IRE Press, 2000), Penyusunan Konsep perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian *Social Capital* untuk

Integrasi Sosial (Buku (Fisipol UGM-Kantor Eks Meneg Masalah Kemasyarakatan, 2001), *Indonesia Menapak Demokrasi* (Yappika Press, 2002), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi* (IRE Press, 2002), *Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta* (CCSS, 2002), *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi* (CCSS Program Pascasarjana Sosiologi UGM, 2002), *Menuju Tata Pemerintahan yang Baik* (IRE Press, 2003), *Promosi Otonomi Desa* (IRE Press, 2003), *Membangun Good Governance di Desa* (IRE Press, 2003), *Refleksi dan Aksi untuk Rakyat* (IRE Press, 2004), *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal* (Pustaka Pelajar dan Pustaka Percik, 2004), *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa* (IRE Press, 2005), *Membangun Aceh dari Gampong* (IRE Press, LPPM Aceh, AusAID, 2007), *Menabur Benih di Lahan Tandus* (catatan pengalaman advokasi kebijakan anggaran daerah di Kebumen dan Bantul) (IRE Press, NDI, 2008), *Mendahulukan si Miskin* (*Merumuskan Konsep dan Pengalaman Pro Poor Budgeting*) (Prakarsa, LkiS, 2008), *Jalan Panjang Advokasi Kebijakan* (FPPM-DRSP, 2009). Artikel yang telah dipublikasikan; "Gerakan Demiliterisasi di era Transisi Demokrasi" (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* UGM, Vol.VI, 1, Juli 2002).

DAMARDJATI SUPADJAR lahir di Losari, Grabag, Magelang, 30 Maret 1940. Menyelesaikan Program Doktor dalam Bidang Filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1990. Guru Besar UGM ini, selain mengajar juga adalah anggota Dewan Pembina Yayasan Universitas Tidar Magelang, Wakil BPM Universitas Widya Mataram Jogjakarta, Ketua Umum Paguyuban Harda Pusara, dan pemimpin umum tabloid *Taman Sari* Jogjakarta. Memperoleh penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden RI, dan Penghargaan Kesetiaan 25 tahun mengabdikan

di UGM. Telah menulis beberapa buku, antara lain; *Filsafat Ketuhanan* (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), *Filsafat Sosial Serat Sastra-Gendhing* (Jogjakarta: FPB, 2001), *Mawas Diri* (Jogjakarta: Media Pressindo, 2001), *Nawang Sari* (cetakan ketiga, YL FPB, 2002), *Wulang Wuruk Jawa* (Jogjakarta: Media Pressindo, 2004).

HEDDY SHRI AHIMSA-PUTRA lahir di Yogyakarta, pada hari Jum'at Pahing, 28 Mei 1954. Memperoleh pendidikan dalam bidang Antropologi dari Universitas Gadjah Mada (Sarjana Muda, 1973-1976); Universitas Indonesia (Sarjana, 1978-1980; M.A.1983); Rijks universiteit Leiden di Negeri Belanda (Pascasarjana, 1980-1982); dan Columbia University, New York City, Amerika Serikat (M.A, 1986; M.Phil, 1989; Ph.D, 1993). Pendidikan tinggi dalam bahasa Inggris diperoleh dari IKIP Sanata Dharma (Extension Course) Yogyakarta (1974-1976), dan bahasa Belanda dari jurusan Sastra Belanda, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (1978-1980).

Kini menjadi guru besar jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, dan staf pengajar pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan menjadi dosen luar biasa di ISI Surakarta, pada program Pascasarjana Kajian Seni (sejak 2000); Universitas Udayana, Denpasar, pada program Pascasarjana Kajian Budaya (sejak 2002); Universitas Islam Indonesia, pada program Pascasarjana Kajian Islam (sejak 2006).

Selain itu juga pernah menjadi dosen luar biasa di : Universitas Atma Jaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta (1996-1997); Institut Agama Islam Darussalam (IAID), Ciamis, pada program sarjana (1996-2000) dan program Pascasarjana

Pendidikan Agama (2003-2005); UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada program Pascasarjana (2000-2005); Universitas Indonesia, pada program Pascasarjana Antropologi (2001-2004); Universitas Riau, pada program Pascasarjana Sosiologi (2004-2005) dan menjadi dosen tamu di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua, pada jurusan Antropologi (2004-2005); Dagon University, Yangon, Myanmar, pada jurusan Antropologi (2005).

Sebagai peneliti, Hedy Shri Ahimsa-Putra pernah menjadi asisten peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, UGM (1976-1978); di Department of Anthropology, Columbia University (1992); peneliti di Pusat Studi Kebudayaan, UGM (1996-2004); dan kini menjadi peneliti senior di Pusat Studi Pariwisata, UGM (sejak 1997); anggota Tim Pertimbangan Penelitian UGM (sejak 2004) serta menjadi anggota Tim Ahli pada Balai Studi dan Konservasi Borobudur (sejak 2000).

Penelitian di berbagai tempat di Indonesia mengenai berbagai masalah sosial-budaya juga telah dilakukannya, di samping penelitian di negara lain, yakni Belanda (1982) dan Myanmar (2006-2007). Sebagai ahli antropologi, Hedy Shri Ahimsa-Putra juga menjadi salah anggota delegasi Indonesia dalam Multicultural Mission (MCM) ASEAN-Japan (1995-1997); menjadi anggota Selection Committee SEASREP (2006-sekarang); menjadi anggota dewan redaksi jurnal *Antropologi Indonesia*; jurnal Iptek-Kom; Ekspresi.

Sebagai penulistunggal, buku-bukunya yang telah diterbitkan adalah *Keluarga Ngadimin and Others* (dalam bahasa Jepang), mengenai lima keluarga pengemudi becak di Yogyakarta (1987); *Minawang*, mengenai hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan (1988); *Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*, mengenai aliran strukturalisme Lévi-Strauss dan penggunaannya

dalam analisis mitos dan karya sastra (2001); *Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra* (2007; Edisi Baru); *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural* (2007; Edisi revisi buku Minawang).

Sebagai editor dan penulis, buku-bukunya yang telah diterbitkan adalah *Ketika Orang Jawa Nyeni* (2000) yang memuat tulisan-tulisan tentang berbagai kesenian di daerah Yogyakarta dan perkembangannya; *Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa* (2003), yang berisi artikel-artikel tentang strategi ekonomi pengusaha industri kecil di Jawa (2003); *Jejak Masa Lalu, Sejuta Warisan Budaya* (bersama Arwan Tuti Artha) (2004), yang berisi tulisan-tulisan mengenai warisan budaya di Yogyakarta; *Masalah Kesehatan Dalam Kajian Ilmu Sosial-Budaya* (2005) yang merupakan kumpulan berbagai artikel tentang kesehatan dengan sudut pandang psikologi, antropologi dan sosiologi; *Esei-esei Antropologi: Teori, Metode dan Etnografi* (2006) yang memuat berbagai tulisan mengenai teori, metode dan hasil penelitian beberapa masyarakat di Indonesia; *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan-perubahan* (2007), yang berisi berbagai tulisan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan budaya Melayu.

Artikel-artikel ilmiahnya juga telah dimuat dalam berbagai buku yang disunting oleh penulis lain, serta dalam majalah: *Basis, Prisma* (LP3ES), *Masyarakat Indonesia* (LIPI), *Masyarakat dan Kebudayaan* (LIPI), *Humaniora* (Fakultas Ilmu Budaya, UGM), *Sosiohu-manika* (Pascasarjana, UGM), *Kalam, Gerbang, Jerat Budaya, Seni* (ISI), *Widyaparwa* (UNY), *Unisia* (UII), *Tembi, Iptek-Kom, Jurnal Ketahanan Nasional* (Pascasarjana Ketahanan Nasional, UGM), *Wacana, Dewaruci* (STSI Surakarta), *Asian Journal of Social Science*. Puluhan makalah untuk seminar, lokakarya dan pelatihan juga telah ditulisnya.

M. NURSAM dilahirkan di Tolo, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di tanah kelahirannya. Pada tahun 1992 terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Sejarah UGM dan merampungkannya delapan tahun kemudian, Mei 2000.

Buku yang sudah ditulisnya adalah: *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002); *Prof. Dr. dr. Moh. Saleh Mangundiningrat: Potret Cendekiawan Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006); *Membuka Pintu Bagi Masa Depan: Biografi Sartono Kartodirdjo* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008) dan *Memenuhi Panggilan Ibu Pertiwi: Biografi Laksamana Muda John Lie* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008); menjadi editor dan memberi pengantar dalam *Surat-Surat Pribadi Soedjatmoko Kepada Presiden (Jenderal) Soeharto, 1968-1971* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Soedjatmoko, 2002). Mengedit puluhan buku dengan tema biografi, sejarah, politik, budaya, sosial dan pemikiran.

Sampai sekarang masih memilih Jogjakarta “Kota Berhati IKLAN” sebagai tempat domisili. Bagi pembaca yang ingin berkomunikasi, silahkan kontak di 0818275229 atau e-mail: nursam@chek.com.



Multikulturalisme *Yogyakarta* dan Identitas Keindonesiaan

Gambaran sebuah masyarakat yang majemuk (plural) cukup mirip dengan 'mozaik'. Sebuah mozaik terdiri dari pecahan-pecahan dengan warna yang sebagian berbeda, sebagian mirip dengan yang lain. Pecahan-pecahan ini disatukan oleh perekat, dan keseluruhannya menampilkan sebuah gambar tertentu. Perekat ini bisa sangat kuat, bisa pula tidak. Jika mozaik ini pecah maka unsur-unsur yang membentuk mozaik tersebut akan terpisah-pisah lagi. Kini, mozaik itu berubah menjadi permadani, penuh warna, corak dan motif. Menyilang dan menjalin satu sama lain, membentuk sebuah permadani budaya dengan gambar dan warna yang beragam”.

Heddy Shri Ahimsa-Putra

Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada

Multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang terbuka untuk dialog dengan budaya-budaya lain dalam kedudukan yang setara. Multikulturalisme dibutuhkan sebagai landasan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional, tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan hidup masyarakat menuju terwujudnya Good Governance dalam pembangunan nasional.

Sri Rahayu Emdan

Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang M

Perpu
Jend

ISBN 602-95784-1-3



9 786029 578416